



HUMAN  
RIGHTS.  
MONITOR

# "Destroy them first... discuss human rights later"

Investigasi ilmiah terhadap operasi Pasukan  
Keamanan Indonesia di Kiwirok, Tanah  
Papua, berdasarkan hukum internasional.



Human Rights Monitor  
Friedrich-Ebert-Str. 55  
42103 Wuppertal, Jerman

web: <https://humanrightsmonitor.org>  
Twitter: @hurimonitor

Memajukan HAM melalui Dokumentasi dan Advokasi

Grafis: @akalbudinetwork

# "Destroy them first... discuss human rights later"

Investigasi terhadap operasi Pasukan  
Keamanan Indonesia di Kiwirok, Papua,  
berdasarkan hukum internasional.

Agustus 2023



# Daftar Isi

1.	Kata Pengantar oleh Eliot Higgins .....	6
2.	Ringkasan Eksekutif.....	7
3.	Metodologi .....	9
4.	Kerangka Hukum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ..	10
5.	Konflik Bersenjata di Tanah Papua.....	13
6.	Operasi Pasukan Keamanan di Distrik Kiwirok .....	16
7.	Analisis Perbandingan Gambar Satelit .....	24
8.	Konsekuensi dari Operasi .....	45
9.	Kesimpulan .....	47
10.	Rekomendasi .....	50

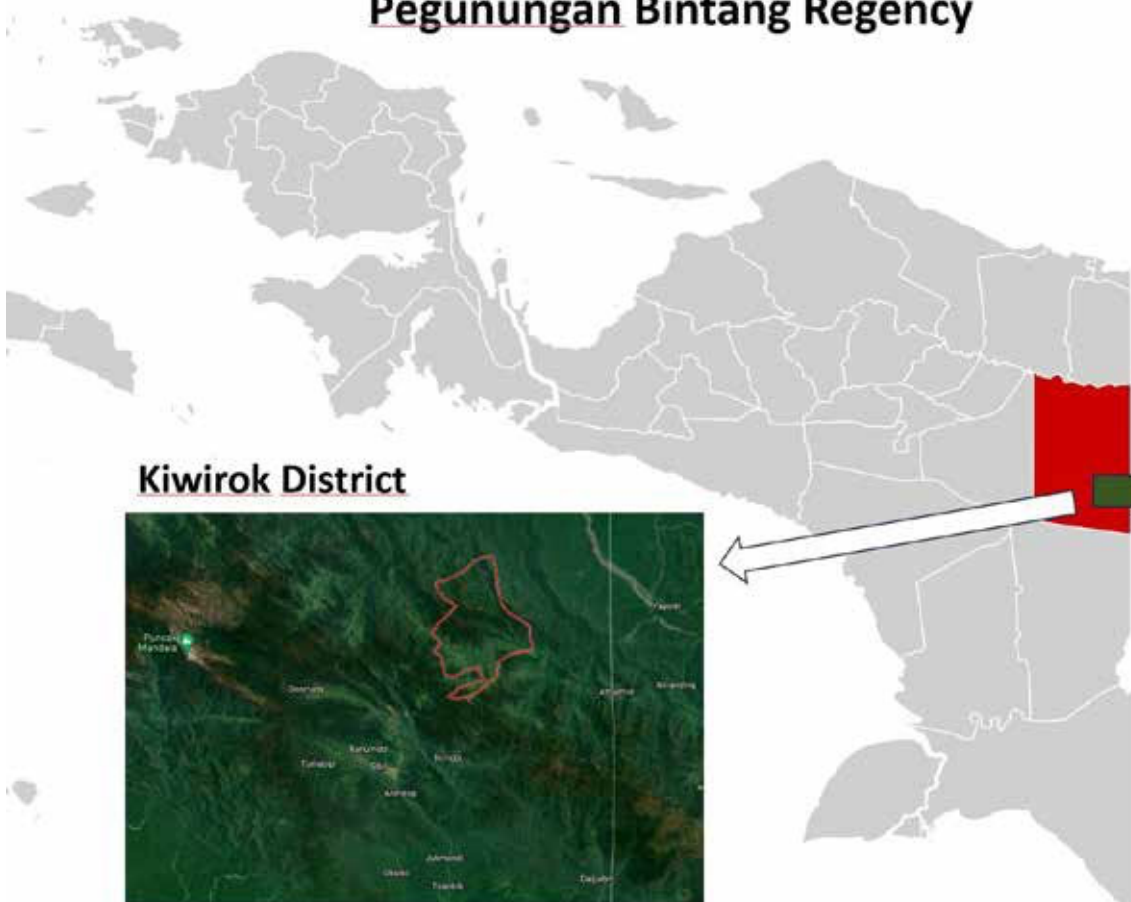


*Peta Tanah Papua (area merah), yang terletak di wilayah Indonesia dan terdiri dari enam provinsi (sumber: Wikimedia)*



*Distrik Kiwirok (ditandai dengan garis merah pada citra satelit di bawah) terletak di Kabupaten Pegunungan Bintang (area merah, bawah), dekat dengan perbatasan antara Papua Nugini dan Indonesia (sumber: Wikipedia dan Google Maps).*

## **Pegunungan Bintang Regency**



# 1. Kata Pengantar oleh Eliot Higgins

Saya percaya bahwa tidak ada manusia yang boleh menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, di mana pun mereka tinggal atau apa pun keyakinan politik mereka. Di dunia saat ini, teknologi memungkinkan kita untuk memahami penderitaan orang-orang yang sering kali jauh dari kita, baik secara fisik maupun budaya. Laporan ini, yang difokuskan pada Distrik Kiwirok di Tanah Papua, menyoroti banyak hal yang mengejutkan dan menuntut perhatian kita semua.



Realitas suram dari operasi aparat keamanan Indonesia di Distrik Kiwirok diilustrasikan dalam kata-kata Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang menolak untuk memprioritaskan hak asasi manusia dalam menangani konflik bersenjata di Tanah Papua. Menekankan mentalitas "Tumpas habis dulu. Urusan HAM kita bicarakan kemudian" menunjukkan pengabaian secara terang-terangan terhadap kehidupan dan martabat manusia. Sikap ini tidak dapat ditoleransi oleh komunitas internasional.

Laporan mendalam ini memberikan bukti-bukti pada penggerebakan yang dilakukan oleh aparat keamanan di Distrik Kiwirok, yang berdampak pada desa-desa adat termasuk fasilitas umum. Laporan ini memberikan gambaran mengerikan tentang lebih dari 2.000 penduduk Orang Asli Papua (OAP) yang mengungsi dan terpaksa mempertahankan hidup dalam kondisi yang tidak layak, tanpa akses atas makanan, pelayanan kesehatan, atau pendidikan.

Analisis terhadap bukti-bukti yang ada memunculkan sebuah pertanyaan penting: Apakah operasi keamanan di Kiwirok merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum humaniter internasional? Tampaknya terdapat bukti-bukti yang cukup kuat mengenai adanya kejahatan seperti pemusnahan dan pemindahan paksa warga sipil, yang merupakan ciri khas dari definisi kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Statuta Roma.

Dengan menyoroti peristiwa-peristiwa yang memprihatinkan ini, harapannya adalah bahwa laporan ini akan menjadi katalisator perubahan di Tanah Papua dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas mengenai konflik yang sedang berlangsung dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah ini. Masyarakat internasional harus mengakui pelanggaran-pelanggaran ini dan bertindak untuk memastikan pertanggungjawaban para pelaku dan keadilan bagi para korban.

Eliot Higgins

*Direktur Kreatif, Stichting Bellingcat*

*Direktur, Bellingcat Productions BV*

## 2. Ringkasan Eksekutif

Pada tanggal 26 April 2021, Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), salah satu lembaga legislatif pada sistem politik di Indonesia, dikutip dari media mengatakan, "Tumpas habis dulu. Urusan HAM kita bicarakan kemudian". Soesatyo membuat pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas pembunuhan Kepala Intelijen Papua, I Gusti Putu Danny, oleh anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Kabupaten Puncak pada 26 April 2021.<sup>1</sup>

Pernyataan Soesatyo menunjukkan rendahnya perhatian terhadap hak asasi manusia dalam operasi keamanan Indonesia terhadap TPNPB dan juga menunjukkan frustrasi pemerintah pusat terhadap konflik bersenjata yang telah berlangsung selama lima dekade di Tanah Papua. Soesatyo meminta pemerintah untuk mengubah kebijakannya di Tanah Papua dan mengambil pendekatan kekerasan terhadap perlawanan bersenjata, meskipun hal itu berdampak buruk bagi penduduk sipil. Ia mengulangi pernyataan ini pada 18 September 2021,<sup>2</sup> tidak lama setelah kekerasan bersenjata mengakibatkan tewasnya seorang petugas kesehatan di Distrik Kiwirok.

Laporan ini memberikan informasi rinci tentang serangkaian serangan aparat keamanan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan (hingga tahun 2022 Provinsi Papua) antara 13 September hingga akhir bulan Oktober 2021. Aparat keamanan Indonesia berulang kali menyerang delapan desa adat di Distrik Kiwirok, menggunakan helikopter dan pesawat tanpa awak. Helikopter-helikopter tersebut dilaporkan menjatuhkan granat mortir ke rumah-rumah warga sipil dan bangunan gereja sambil menembaki warga sipil tanpa pandang bulu. Pasukan darat membakar gedung-gedung publik dan rumah-rumah penduduk,

membakar dan membunuh ternak warga. Beberapa sekolah dan fasilitas umum yang digunakan oleh pasukan keamanan sebagai markas dibakar habis oleh paraanggota TPNPB.

Serangan terhadap desa-desa adat memiliki dampak yang luas bagi masyarakat adat Ngalum di Kiwirok. Analisis gambar satelit menunjukkan bahwa 206 gedung di delapan desa dihancurkan selama operasi aparat keamanan di Kiwirok, termasuk rumah-rumah warga dan bangunan umum seperti gereja dan sekolah. Setidaknya 2.252 masyarakat adat Ngalum mengungsi dan belum kembali ke rumah mereka hingga Juni 2023. Situasi keamanan di Kiwirok tetap belum tenang. Pos-pos keamanan dan posisi penembak jitu di seluruh Distrik Kiwirok membatasi kebebasan bergerak dan menimbulkan ketakutan di antara para pengungsi. Sebagian besar pengungsi internal (IDP) dari Kiwirok terpaksa tinggal di tempat penampungan di hutan tanpa akses ke layanan kesehatan atau pendidikan dan dengan kesulitan ketahanan pangan yang serius. Kebanyakan pengungsi adalah perempuan, lansia, dan anak-anak. Mereka tidak menerima bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun.

Pola penyerbuan aparat keamanan di Kiwirok menimbulkan pertanyaan apakah operasi pasukan negara dilaksanakan sesuai dengan hukum humaniter internasional. Statuta Roma memberikan definisi hukum untuk kejahatan yang paling serius seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Definisi ini mencakup pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Menurut Pasal 7 Statuta Roma, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah 'kekejaman yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap

1 CNN Indonesia (26.04.2021): Ketua MPR: Tumpas Habis KKB Papua, Urusan HAM Bicarakan Nanti, tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210426114223-32-634743/ketua-mpr-tumpas-habis-kkb-papua-urusan-ham-bicarakan-nanti>

2 Banyuwangi Times (18.09.2023): KKB Papua Makin Biadab, Ketua MPR RI Minta TNI-Polri Tumpas Teoris KKB tersedia di: <https://banyuwangi.times.co.id/berita/berita/wfpz57wwqx/kkb-papua-makin-biadab-ketua-mpr-ri-minta-tnipolri-tumpas-teoris-kkb>

penduduk sipil mulai dari pembunuhan dan pemusnahan hingga pemindahan penduduk secara paksa.

Investigasi sumber terbuka (*open source investigation*) terhadap operasi pasukan keamanan di Kiwirok antara 13 September hingga akhir Oktober 2021 mengungkapkan temuan baru yang memungkinkan kondisi dan situasi penggerebekan untuk dapat dinilai berdasarkan kriteria hukum kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana didefinisikan dalam Statuta Roma. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa serangan udara dan darat dilakukan secara meluas dan sistematis, serta menargetkan penduduk sipil asli di Kiwirok (Pasal 7(1)). Pasukan keamanan tambahan dikerahkan untuk melakukan penggerebekan di desa-desa, mengikuti pola yang sama dan menggunakan peralatan militer yang canggih. Dalam kasus Kiwirok, Human Rights Monitor menemukan bukti-bukti yang mendukung unsur pemusnahan (Pasal 7(2)(b)), dan deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7(2)(d)).

Meskipun penyerangan tersebut tidak menyebabkan kematian warga sipil secara langsung, namun masyarakat terpaksa mengungsi ke hutan dan tinggal di tempat penampungan tanpa akses terhadap makanan dan obat-obatan yang memadai, di mana mereka rentan terhadap hipotermia, malnutrisi, dan penyakit. Hingga 23 Juli 2023, setidaknya 72 pengungsi dilaporkan telah meninggal dunia. Situasi kehidupan di tempat penampungan pengungsi, terisolasi dari segala bentuk bantuan pemerintah. Para pengungsi juga tidak bisa kembali ke rumah mereka karena keselamatan tidak dapat terjamin. Kondisi ini memenuhi definisi Pasal 7(2)(b) Statuta Roma tentang Pemusnahan. Pola serangan tersebut konsisten dengan deskripsi pemindahan paksa melalui tindakan-tindakan pemaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7(2)(d).

Meskipun Indonesia belum bersedia menjadi pihak dalam Statuta Roma, definisi yang ada di dalamnya merupakan norma hukum yang diakui secara internasional. Hanya penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas tuduhan kejahatan terhadap

kemanusiaan mampu untuk mengungkap struktur komando, menunjukkan siapa yang memerintahkan serangan tersebut, dan unit aparat keamanan mana yang melakukan penyerangan di Kiwirok.

### 3. Metodologi

HRM telah memantau konflik bersenjata di Tanah Papua dengan seksama, berdasarkan laporan media dan data yang dikumpulkan oleh para pekerja gereja dan pembela hak asasi manusia di lapangan. Gereja-gereja memainkan peranan penting dalam mendokumentasikan dan mengadvokasi pelanggaran hak asasi manusia, karena kehadiran pasukan keamanan yang besar mengakibatkan kurangnya akses bagi OMS dan jurnalis ke daerah konflik. Hal itu membuat banyak pelanggaran hak asasi manusia tidak diketahui.

Mayoritas laporan media berasal dari *platform* berita daring, seperti Jubi<sup>3</sup> dan Suara Papua.<sup>4</sup> Kedua *platform* tersebut memiliki fokus geografis di Tanah Papua. Media-media kecil yang relatif independen ini memiliki jaringan jurnalis yang luas di seluruh wilayah tersebut. Beda dengan berita dari media nasional, Jubi dan Suara Papua seringkali mempublikasikan artikel-artikel tentang pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua yang melampaui narasi yang dipromosikan oleh perwakilan pemerintah, polisi, atau pejabat militer. Terlepas dari lingkungan yang represif di Tanah Papua, kedua media ini terus mempublikasikan wawancara dengan para korban, akademisi, aktivis, dan OMS tentang pelanggaran HAM.

Mitra lokal terus mendokumentasikan konflik bersenjata dan pelanggaran HAM. Mereka membagikan informasi tersebut kepada HRM dan pemangku kepentingan lainnya. Gereja-gereja di Tanah Papua dan organisasi HAM mencari mitra internasional yang bisa membantu mereka menyampaikan informasi tentang pelanggaran HAM kepada komunitas internasional yang lebih luas. Mereka bekerja dalam lingkungan yang sangat represif, karena pemerintah terus mencegah perhatian internasional terhadap konflik dengan membatasi akses bagi organisasi hak asasi manusia, jurnalis asing, dan pengamat internasional.

Para pekerja gereja dan pembela hak asasi manusia di Tanah Papua telah berhasil pergi ke

Distrik Kiwirok untuk mengumpulkan data mengenai penyerangan dan tempat penampungan pengungsi di Distrik Kiwirok. Mereka mengunjungi beberapa tempat penampungan pengungsi di Kabupaten Pegunungan Bintang, merekam kesaksian para saksi, dan mengumpulkan data kuantitatif tentang para pengungsi. Wawancara dengan para pengungsi sangat penting untuk memahami jalannya serangan udara dan darat serta mendokumentasikan kondisi kehidupan di tempat penampungan pengungsi. Mereka mengambil foto-foto rumah-rumah yang hancur dan kamp-kamp pengungsian sementara di hutan. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang serangan bersenjata, HRM melengkapi data yang dikumpulkan di lapangan dengan penelitian sumber terbuka dan analisis komparatif gambar satelit. Aplikasi sumber terbuka utama yang digunakan adalah '*Fire Information for Resource Management System*' (FIRMS) dan [Metadata2go](https://metadata2go.com/).

*'Fire Information for Resource Management System*' (FIRMS), yang dikembangkan pada tahun 2007 oleh University of Maryland, dengan pendanaan dari Program Ilmu Pengetahuan Terapan NASA dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), menyediakan lokasi titik api aktif bagi para pengelola sumber daya alam yang menghadapi tantangan dalam memperoleh informasi kebakaran yang berasal dari satelit secara tepat waktu. Layanan peta FIRMS AS/Kanada diluncurkan pada bulan Januari 2021 melalui kemitraan dengan Dinas Kehutanan AS. FIRMS dapat menemukan titik api besar di peta global. Aplikasi ini juga memungkinkan pelacakan historis lokasi kebakaran. HRM menggunakan aplikasi ini untuk mengonfirmasi lokasi dan tanggal serangan bersenjata yang melibatkan granat mortir dan pembakaran.

3 <https://jubi.id/>

4 <https://suarapapua.com/>



Untuk memverifikasi tanggal dan waktu kejadian, HRM juga menggunakan [Metadata2go](#), sebuah perangkat sumber terbuka yang menganalisis metadata foto dan video yang diambil selama atau sesaat setelah penggerebekan. Meskipun tidak semua materi media mengandung informasi metadata yang relevan, metode ini dapat diterapkan pada beberapa foto dan video yang diambil di Kiwirok.

HRM menggunakan analisis komparatif citra satelit, sebuah metode yang membandingkan gambar-gambar dari lokasi yang sama dari tanggal yang berbeda, untuk mengidentifikasi desa-desa dan rumah-rumah yang rusak akibat serangan bersenjata. Meskipun gambar satelit memberikan gambaran rinci tentang kehancuran di Kiwirok, citra satelit tidak menunjukkan siapa yang menyebabkan kerusakan tersebut. Oleh karena itu, HRM berkonsultasi dengan pengungsi yang membantu mengidentifikasi bangunan-bangunan tersebut dan memberikan informasi tentang para pelaku.

Gambar satelit yang diperoleh pada tanggal 30 April 2021 menunjukkan desa-desa yang masih utuh sebelum operasi dimulai. Citra satelit tanggal 29 September 2021 menunjukkan kerusakan yang disebabkan oleh serangan bersenjata antara tanggal 13 dan 28 September 2021. Citra satelit ketiga dari tanggal 3 Juni 2022 menunjukkan semakin banyaknya bangunan yang hancur dibandingkan dengan tanggal 29 September 2021.

Tidak ada gambar satelit yang cerah dari Distrik Kiwirok setelah tanggal 29 September 2021 karena tutupan awan yang tebal. Kondisi tutupan awan seperti ini biasa terjadi di dataran tinggi tengah Tanah Papua. Curah hujan dapat mencapai lebih dari 5.000 mm/tahun di situ. Hanya sampai tanggal 3 Juni 2022, satelit baru

dapat mengambil gambar yang berguna. Berbeda dengan citra satelit yang diambil pada 29 September 2021, bekas kebakaran sudah ditumbuhi rumput atau tanaman, namun denah bekas rumah masih dapat diidentifikasi dalam foto.

Penggunaan metode investigasi berbeda yang saling melengkapi memungkinkan HRM untuk mengembangkan kronologi kejadian. Banyak desa yang tidak terhubung dengan jangkauan jaringan telepon seluler, yang menghambat arus informasi, terutama pada saat konflik. Sebagian besar pengungsi hanya dapat mengakses koneksi jaringan di area tertentu, misalnya dekat kota, atau pos-pos misi. Para pekerja kemanusiaan dan jurnalis dibatasi datang ke Kiwirok dan mencari informasi secara bebas. Oleh karena itu, belum ada laporan yang komprehensif tentang penggerebekan dan serangan yang tersedia sebelum laporan ini.

## 4. Kerangka Hukum terkait Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Kerangka hukum yang mendasarinya perlu dipahami dulu sebagai dasar pengkajian apakah pasukan keamanan Indonesia telah melakukan 'Kejahatan Terhadap Kemanusiaan' di Distrik Kiwirok. Kerangka hukum yang dapat digunakan sebagai referensi untuk menilai temuan-temuan di lapangan berdasarkan definisi hukum yang ditetapkan oleh hukum internasional. Statuta Roma adalah bagian dari hukum humaniter internasional dan berisi kerangka hukum dengan definisi 'Kejahatan Kemanusiaan'.



Perjanjian ini didirikan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan diadopsi pada konferensi diplomatik di Roma, Italia, pada tanggal 17 Juli 1998. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002. Statuta ini menetapkan fungsi, yurisdiksi, dan struktur pengadilan. Statuta Roma memberikan definisi hukum untuk empat kejahatan utama internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan ini dalam tiga kasus: pertama, jika kejahatan tersebut dilakukan di wilayah suatu Negara Pihak; kedua, jika warga negara dari suatu Negara Pihak yang melakukan kejahatan tersebut; atau ketiga, jika kejahatan tersebut dirujuk ke Jaksa Penuntut oleh Dewan Keamanan PBB.

Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma dan tidak mengakui yurisdiksi ICC atas penuntutan empat kejahatan internasional utama. Kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap

kejahatan kemanusiaan telah diberi status *jus cogens* sebagai prinsip-prinsip fundamental dalam hukum internasional karena sifatnya yang serius. Hal ini berarti bahwa larangan terhadap kejahatan kemanusiaan merupakan norma yang bersifat '*peremptory*'.<sup>5</sup> Oleh karena itu tidak ada pengecualian dalam hal ini.<sup>6</sup> Di bawah hukum internasional, semua negara, termasuk Indonesia, berkewajiban untuk mematuhi larangan ini.<sup>7</sup>

Perjanjian ini berisi definisi hukum tentang "Kejahatan Terhadap Kemanusiaan". Dalam konteks operasi keamanan di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, hal ini adalah yang paling relevan di antara empat kejahatan internasional utama. Pasal 7 Statuta Roma mencantumkan sebelas kejahatan yang dapat dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil yang mengetahui serangan tersebut (lihat kotak di bawah). Menurut Pasal 7 ayat 2a, '*Serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berarti suatu tindakan yang melibatkan beberapa tindakan yang disebutkan dalam ayat 1 terhadap penduduk sipil, sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan Negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut.*'

## Statuta Roma, Pasal 7 Kejahatan kemanusiaan

1. Untuk tujuan Statuta ini, "kejahatan kemanusiaan" berarti salah satu dari tindakan-tindakan berikut ini ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil, dengan pengetahuan tentang serangan tersebut:

- (a) Pembunuhan;
- (b) Pemusnahan;
- (c) Perbudakan;
- (d) Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa;
- (e) Pemenjaraan atau perampasan kebebasan fisik lainnya yang berat yang melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
- (f) Penyiksaan;

5 D  
h

[humanity.shtml](#), terakhir diakses pada 11.07.2023

6 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 23 Mei 1969, Pasal. 53, 1155 UNTS 331

7 (1951). Mahkamah menyatakan: "prinsip-prinsip yang mendasari Konvensi adalah prinsip-prinsip yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab sebagai sesuatu yang mengikat Negara, bahkan tanpa adanya kewajiban konvensional"

- (g) Pemerksaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk kekerasan seksual lainnya yang sebanding dengan kekerasan seksual;
- (h) Penganiayaan terhadap kelompok atau kolektivitas yang dapat diidentifikasi atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin sebagaimana didefinisikan dalam ayat 3, atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang tidak dapat diterima menurut hukum internasional, sehubungan dengan tindakan apa pun yang disebutkan dalam ayat ini atau tindak pidana apa pun yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan;
- (i) Penghilangan orang secara paksa;
- (j) Kejahatan apartheid;
- (k) Tindakan tidak manusiawi lainnya yang memiliki karakter serupa yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar, atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan mental atau fisik.

**2. Untuk tujuan paragraf 1:**

- (a) "Serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil" berarti suatu tindakan yang melibatkan beberapa tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terhadap penduduk sipil, sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan Negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut;
- (b) "Pemusnahan" mencakup penghancuran kondisi kehidupan yang disengaja, antara lain perampasan akses terhadap makanan dan obat-obatan, yang diperhitungkan untuk menghancurkan sebagian dari suatu populasi;
- (c) "Perbudakan" berarti pelaksanaan salah satu atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang dan termasuk pelaksanaan kekuasaan tersebut dalam rangka perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak;
- (d) "Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa" berarti pemindahan paksa orang-orang yang bersangkutan melalui pengusiran atau tindakan pemaksaan lainnya dari wilayah tempat mereka berada secara sah, tanpa alasan yang diizinkan berdasarkan hukum internasional;
- (e) "Penyiksaan" berarti penimpaan rasa sakit atau penderitaan yang hebat secara sengaja, baik fisik maupun mental, pada seseorang yang berada dalam tahanan atau di bawah kendali terdakwa; kecuali bahwa penyiksaan tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya karena, yang melekat pada, atau sebagai akibat dari, sanksi-sanksi yang sah;
- (f) "Kehamilan paksa" berarti pengurangan secara tidak sah terhadap seorang perempuan yang dipaksa hamil, dengan maksud untuk mempengaruhi komposisi etnis suatu populasi atau melakukan pelanggaran berat lainnya terhadap hukum internasional. Definisi ini tidak boleh ditafsirkan dengan cara apa pun untuk mempengaruhi hukum nasional yang berkaitan dengan kehamilan;
- (g) "Persekusi" berarti perampasan hak-hak dasar yang disengaja dan berat yang bertentangan dengan hukum internasional karena identitas kelompok atau kolektivitas;
- (h) "Kejahatan apartheid" berarti tindakan tidak manusiawi dengan karakter yang serupa dengan yang disebutkan dalam ayat 1, yang dilakukan dalam konteks rezim yang dilembagakan dari penindasan dan dominasi sistematis oleh satu kelompok ras atas kelompok atau kelompok-kelompok ras lainnya dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim tersebut;
- (i) "Penghilangan orang secara paksa" berarti penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh, atau dengan otorisasi, dukungan, atau persetujuan dari, suatu Negara atau organisasi politik, yang diikuti dengan penolakan untuk mengakui perampasan kebebasan tersebut atau untuk memberikan informasi mengenai nasib atau keberadaan orang-orang tersebut dengan maksud

Tidak semua tindakan yang disebutkan dalam Pasal 7(1) relevan dalam konteks serangan bersenjata terhadap desa-desa di Distrik Kiwirok. Berdasarkan pelanggaran HAM yang didokumentasikan, ada tiga tindakan yang relevan: Pertama, (a) Pembunuhan, kedua, (b) Pemusnahan, dan ketiga, (d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk.

Secara khusus, deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa memiliki relevansi yang tinggi karena serangan bersenjata di Kiwirok dilaporkan menyebabkan pengungsian lebih dari 2.000 orang adat suku Ngalum. Mereka harus bertahan hidup di tempat penampungan terpencil di hutan tanpa akses pangan,

layanan kesehatan, dan pendidikan yang memadai. Dalam hal ini, Statuta Roma menetapkan bahwa "Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa" berarti pemindahan paksa orang-orang yang bersangkutan melalui pengusiran dari wilayah atau tindakan pemaksaan lainnya secara sah, tanpa alasan yang diizinkan oleh hukum internasional"

## 5. Konflik Bersenjata di Tanah Papua

Konflik bersenjata di Tanah Papua telah memburuk secara signifikan sejak Desember 2018, ketika anggota TPNPB membunuh setidaknya 19 orang.

pekerja jalan di Kabupaten Nduga.<sup>8</sup> Insiden tersebut menandai eskalasi kembali konflik bersenjata di Tanah Papua. Statistik konflik menunjukkan peningkatan kekerasan yang terus menerus selama tiga tahun terakhir, dan mencapai puncaknya pada tahun 2022. Jumlah korban jiwa warga sipil yang terkait dengan konflik meningkat dari 28 orang pada tahun 2021 menjadi 43 orang pada tahun 2022 (lihat statistik konflik di bawah).

Pada awal tahun 2022, pemerintah Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih lunak terhadap operasi keamanan terhadap TPNPB. Namun, kebijakan ini dapat berubah menjadi lebih tegas setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Jenderal Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang baru pada Desember 2022. Presiden Jokowi menginstruksikan Margono untuk mengambil tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok bersenjata di Tanah Papua.<sup>9</sup> Berdasarkan pernyataan ini, kemungkinan kekerasan bersenjata di Tanah Papua akan meningkat pada tahun 2023 dan 2024.

8 The Diplomat (24.12.2018): Pembantaian di Nduga: Pemberontakan Papua di Indonesia, Pembunuhan baru-baru ini menyoroti bagaimana upaya Indonesia untuk menggunakan bujukan ekonomi untuk mengamankan perdamaian di Papua gagal. tersedia di: <https://thediplomat.com/2018/12/massacre-in-nduga-indonesias-papuan-insurgency/>

9 CNN Indonesia (19.12.2022): Jokowi Singgung KKB di Papua Usai Lantik Panglima TNI Yudo Margono, tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221219132620-20-889265/jokowi-singgung-kkb-di-papua-usai-lantik-panglima-tni-yudo->

[margono.](#)

Selain itu, polisi Indonesia telah gagal mengekang perdagangan senjata ilegal di Tanah Papua, yang memicu kekerasan bersenjata.<sup>10</sup>

Terlepas dari intensifikasi konflik, tidak ada indikasi rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai, melainkan perbedaan semakin jauh. Pada awal Desember 2022, juru bicara TPNPB, Seby Sambom, mengumumkan bahwa TPNPB akan melakukan "revolusi total" dalam dua tahun ke depan.<sup>11</sup> Pernyataan ini muncul tidak lama setelah pembicaraan pertama mengenai jeda kemanusiaan di Kabupaten Maybrat antara para pemangku kepentingan di Tanah Papua, termasuk ULMWP, dan Jakarta, gagal. TPNPB bersedia untuk berbicara dengan Jakarta di bawah mediasi pihak ketiga seperti PBB. Namun, kekerasan yang terjadi pada tahun 2022 dan pernyataan dari Jokowi serta perwakilan TPNPB menunjukkan bahwa dialog tidak mungkin dapat dilakukan saat ini.

Pemerintah pusat ingin mempertahankan kontrol atas Tanah Papua, yang memiliki sumber daya alam yang luas dan kepadatan penduduk yang rendah. Kedua aspek ini dipandang penting bagi masa depan Indonesia. Jakarta mengejar kepentingannya dengan meningkatkan kehadiran pasukan keamanannya, memberlakukan pembagian wilayah administratif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Tanah Papua.

10 Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) menerbitkan laporan tentang perdagangan senjata ilegal di Papua Barat, yang menyatakan bahwa kasus-kasus perdagangan senjata ilegal yang telah diproses secara hukum diyakini hanya merupakan puncak gunung es. Asumsi ini didasarkan pada berbagai pengamatan. Para pedagangnyanya terdiri dari berbagai profesi sipil hingga polisi dan militer, yang melibatkan transportasi darat, air, dan udara. Pengadilan terhadap para pedagang berujung pada penuntutan terhadap mereka, namun gagal untuk memproses para pemasok dan pemodal, yang terus menjual senjata api di pasar ilegal. Bahkan senjata dengan nomor seri tidak ditelusuri kembali untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berada di bagian atas rantai pasokan.

11 Suara Papua (11.12.2022): TPNPB Tetapkan Revolusi Total Selama Dua Tahun, tersedia di: <https://suarapapua.com/2022/12/11/tpnpb-tetapkan-revolusi-total-selama-dua-tahun/>

Statistik menunjukkan memburuknya konflik bersenjata secara signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Jumlah serangan bersenjata meningkat dari 64 pada tahun 2020 menjadi 85 pada tahun 2021 dan tetap tinggi di angka 72 pada tahun 2022. Indikator yang paling mencolok dari kemunduran konflik adalah jumlah warga sipil yang terbunuh dalam serangan bersenjata atau sebagai akibat tidak langsung dari pengungsian terkait konflik. Jumlah korban sipil yang tewas dalam kekerasan bersenjata meningkat dari 28 orang pada tahun 2021 menjadi 43 orang pada tahun 2022 (lihat statistik konflik di bawah).

Di antara para korban terdapat banyak warga non-Papua, yang dibunuh oleh para anggota TPNPB yang dicurigai berkolaborasi atau bekerja untuk pasukan keamanan Indonesia.

Pada tahun 2019, 196 pengungsi internal (*Internally-Displaced Persons-IDPs*) dilaporkan meninggal dunia karena kondisi di pengungsian. Kurang layakannya kondisi tempat tinggal, makanan bergizi, layanan publik, dan dukungan pemerintah berdampak serius bagi para pengungsi. Kelompok yang paling rentan adalah bayi, anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

Jumlah pengungsi meninggal yang terdokumentasi hampir konstan hingga tahun 2020 dengan 186 orang, tetapi meningkat tajam menjadi 745 untuk tahun 2021 dan 2022, dengan 615 orang meninggal yang berasal dari Nduga saja.<sup>12</sup> Diperkirakan 60.000 pengungsi<sup>13</sup> tersebar di daerah hutan terpencil dan daerah perkotaan di seluruh Tanah Papua (lihat statistik konflik di bawah ini). Kondisi geografis yang sulit dan kehadiran aparat keamanan yang sangat ketat menghalangi pekerjaan kelompok-kelompok solidaritas, gereja, dan

pembela HAM untuk mengumpulkan data yang komprehensif mengenai para pengungsi dan situasi mereka.

Sebagian besar bentrokan bersenjata di Tanah Papua mengikuti pola yang sama. Pengerahan personel militer yang terus menerus dan perluasan infrastruktur militer dan polisi merupakan pemicu konflik bersenjata. Pemerintah Indonesia beralasan bahwa hal ini diperlukan untuk menjamin keamanan bagi warganya dan melindungi upaya pembangunan. Namun, pembentukan pos-pos militer dan kantor polisi baru sering kali disertai dengan pelanggaran HAM dan eksploitasi sumber daya alam. Para pekerja non-Papua dan anggota pasukan keamanan di daerah-daerah terpencil menjadi sasaran empuk serangan TPNPB, yang ingin mempertahankan tanah leluhur mereka dari penguasaan pemerintah Indonesia. Aparat keamanan biasanya melakukan penggerebekan di desa-desa adat di sekitarnya untuk menanggapi serangan bersenjata. Ribuan masyarakat adat Papua telah melarikan diri dari rumah mereka karena takut dibunuh, disiksa, atau ditangkap secara sewenang-wenang dalam penggerebekan tersebut. Sebagian besar terpaksa mengungsi hingga saat ini.

Berbeda dengan tiga tahun sebelumnya, militer menahan diri untuk tidak melakukan serangan udara sepanjang tahun 2022. Hal ini mungkin terkait dengan "pendekatan keamanan yang lebih lunak", yang diumumkan pemerintah pada akhir bulan November 2021. Selain di Kabupaten Pegunungan Bintang (Distrik Kiwirok), aparat keamanan Indonesia dilaporkan melakukan serangan udara di Kabupaten Nduga pada Desember 2018<sup>15</sup>, serta di Kabupaten Puncak<sup>16</sup> dan Yahukimo (Distrik Suru-Suru)<sup>17</sup> pada tahun 2021.

12 Jubi (19.12.2022): Nduga darurat militer sejak 2018 dan masyarakat masih mengungsi, tersedia di: <https://jubi.id/kabupaten-jawawijaya/2022/nduga-darurat-militer-sejak-2018-dan-masyarakat-masih-mengungsi/>

13 Pemantau Hak Asasi Manusia (02.01.2023): Update IDP 2022 - lebih dari 60.000 IDP di Papua Barat masih belum mendapat bantuan pemerintah, tersedia di: <https://humanrightsmonitor.org/news/idp-update-2022-lebih-dari-60000-idp-di-papua-barat-tetap-tanpa-bantuan-pemerintah/>

14 Koalisi Internasional untuk Papua (18.11.2021): Pemerintah Indonesia membantah dugaan penggunaan senjata kimia selama operasi militer di Kabupaten Nduga, tersedia di: <https://humanrightspapua.org/news/2018/indonesian-government-denies-dugaan-penggunaan-senjata-kimia-selama-operasi-militer-di-kabupaten-nduga/>

15 Koalisi Internasional untuk Papua (17.11.2021): Operasi militer di Puncak sebabkan pengungsian internal - Jakarta lanjutkan pengerahan pasukan tambahan, tersedia di: <https://humanrightspapua.org/news/2021/operasi-militer-di-puncak-sebabkan-pengungsian-internal-jakarta-lanjutkan-pengerahan-pasukan-tambahan/>

16 Pemantau Hak Asasi Manusia (10.01.2022): Konflik Bersenjata di Papua Barat Sepanjang 2021 - Tren, Perkembangan dan Indikasi Masa Depan, tersedia di: <https://humanrightsmonitor.org/news/wp-konflik-bersenjata-2021/>

**Statistik kekerasan bersenjata di Tanah Papua antara tahun 2017 dan 2022**

KEKERASAN BERSENJATA DI TANAH PAPUA	BENTROKAN BERSENJATA DI TANAH PAPUA					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah bentrokan/serangan bersenjata	24	44	33	64	85	72
Jumlah korban jiwa di antara pasukan keamanan	3	8	18	11	18	19
Jumlah pasukan keamanan yang terluka	8	15	12	10	34	29
Jumlah korban di antara para pejuang TPNPB	2	12	14	14	24	8
Jumlah pejuang TPNPB yang terluka	2	4	0	1	8	1
Jumlah total korban di antara warga sipil selama bentrokan bersenjata atau penyerbuan	3	42	20	27	28	43
Jumlah warga sipil yang dibunuh oleh anggota pasukan keamanan	0	17	13	20	12	5
Jumlah warga sipil yang dibunuh oleh anggota TPNPB	3	25	7	7	14	38
Jumlah warga sipil yang terbunuh (pelaku tidak jelas)	0	0	0	0	2	0
Jumlah korban yang meninggal selama konflik bersenjata karena dampak dari pengungsian internal	0	20	196	186	745	
Jumlah total warga sipil yang terluka	12	15	9	26	20	21
Jumlah warga sipil yang dilukai oleh anggota pasukan keamanan	9	7	9	10	7	2
Jumlah warga sipil yang dilukai oleh anggota TPNPB	3	8	0	16	13	19

*(Statistik konflik didasarkan pada laporan<sup>17</sup> rilis media, artikel berita, dan informasi yang dikumpulkan oleh gereja dan pembela HAM)*

17 Koalisi Internasional untuk Papua (Desember 2021): Hak Asasi Manusia di Papua Barat 2021, hlm. 126



Selama empat tahun terakhir, konflik bersenjata telah bergeser ke kabupaten-kabupaten baru di provinsi Papua Barat dan dataran tinggi tengah. Kabupaten Pegunungan Bintang adalah salah satu daerah konflik baru. Empat bentrokan bersenjata terjadi pada bulan Maret dan Oktober 2020. Jumlah ini dengan cepat meningkat menjadi sepuluh serangan bersenjata pada tahun 2021 dan sebelas serangan pada tahun 2022. Saat ini, Pegunungan Bintang telah menjadi salah satu titik utama kekerasan bersenjata di Tanah Papua hanya dalam kurun waktu dua tahun. Anggota TPNPB di Pegunungan Bintang memiliki beberapa senjata api otomatis yang diambil dari helikopter yang dilaporkan hilang pada 28 Juni 2019.<sup>18</sup> Sementara itu, TPNPB di Pegunungan Bintang tampaknya telah merekrut lebih banyak anggota dan berhasil meningkatkan persenjataan.

## 6. Operasi Pasukan Keamanan di Distrik Kiwirok

Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, dihuni oleh penduduk asli Suku Ngalum. Selain tenaga kesehatan dan pegawai negeri sipil, sebagian besar penduduk lokal di Distrik Kiwirok adalah suku Ngalum. Suku Ngalum masih mengikuti cara hidup tradisional. Mereka menanam ubi jalar dan singkong, makanan pokok di dataran tinggi tengah Papua. Mereka memelihara babi, yang berfungsi sebagai sumber protein dan juga memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi dalam pertukaran selama pernikahan dan upacara lainnya. Suku Ngalum mengandalkan lahan mereka untuk bertani dan beternak untuk bertahan hidup di lingkungan yang penuh tantangan di dataran tinggi tengah Papua. Berburu dan meramu hanyalah kegiatan tambahan untuk memperkaya pola makanan mereka.

Sama seperti daerah dataran tinggi tengah lainnya, cuaca di Kabupaten Pegunungan Bintang dapat berubah dengan cepat, dan temperaturnya sangat bervariasi tergantung ketinggian. Embun beku di malam hari dapat terjadi di atas ketinggian 4.000 m, dan salju turun secara berkala di atas ketinggian 4.500 m.<sup>19</sup> Ketinggian tertinggi di kabupaten ini adalah Puncak Mandala, yaitu 4.760 meter. Kiwirok adalah salah satu dari 34 distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Kabupaten ini terpencil dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Tidak ada jalan penghubung ke kabupaten tetangga. Transportasi barang dan orang sangat bergantung pada pesawat kecil.

Konflik bersenjata di Distrik Kiwirok semakin parah pada awal September 2021. Sebelumnya, TPNPB hanya melakukan serangan-serangan kecil di distrik-distrik lain seperti Serambakon, Oksibil, dan Oksob. Pada 8 September 2021, anggota TPNPB membakar alat berat untuk pembangunan Jalan Trans-Papua dari Oksibil ke Kiwirok di Kampung Mangabip.

Tak lama kemudian, bentrokan bersenjata antara aparat keamanan dan pejuang TPNPB terjadi di Distrik Kiwirok pada 13 September 2021. Kekerasan bersenjata meningkat sekitar pukul 10.00 pagi (WIT). Waktu kejadian direkonstruksi berdasarkan video pembakaran fasilitas yang diambil oleh anggota pasukan keamanan Indonesia selama baku tembak. Analisis video dan metadata<sup>20</sup> mengonfirmasi bahwa video tersebut direkam pada pukul 10.32 pagi di Desa Mangoldogi, Distrik Kiwirok. Anggota TPNPB membakar fasilitas umum, termasuk Puskesmas dan sekolah. Delapan orang petugas kesehatan dan seorang anggota TNI terluka. Satu orang petugas kesehatan dan satu orang anggota TPNPB tewas dalam insiden tersebut. TPNPB menangkap seorang petugas kesehatan bernama Gerald Sokoy (lihat foto di bawah) selama insiden tersebut. Dia dibebaskan setelah beberapa hari.

Penyebab pemicuan pembakaran fasilitas kesehatan dan sekolah tersebut tidak jelas. Oleh karena itu, para pengamat HAM telah menuntut dilakukannya investigasi independen

18 Tribun News (15.02.2020): Misteri Hilangnya 10 Senjata TNI di Helikopter yang Jatuh di Pegunungan Bintang, Pangdam Duga Ini, tersedia di: <https://batam.tribunnews.com/2020/02/15/misteri-hilangnya-10-senjata-tni-di-helikopter-yang-jatuh-di-pegunungan-bintang-pangdam-duga-ini?page=all>

19 Prentice, M.L. dan G.S. Hope (2007): Iklim Papua dan perubahannya baru-baru ini, dalam Marshall & Beehler eds Bagian 1, Ekologi Papua, hal 177-195

20 Human Rights Monitor menggunakan perangkat sumber terbuka Metadata2Go untuk analisis dat





*Petugas kesehatan Gerald Sokoy (sebelah kanan, mengenakan kaus biru) disandera oleh anggota TPNPB pada 13 September 2021.*



*Posisi penembak jitu di Desa Mangoldogi. Foto ini diambil antara Desa Kiwi dan Distrik Okhika pada Oktober 2022. Penembak jitu menggunakan laser pointer untuk membidik di malam hari. Sinar laser dari beberapa senapan mengarah ke langit seperti ketika senapan ditempatkan satu sama lain dengan laras mengarah ke atas. Menurut sang fotografer, penembak jitu berulang kali membidiknya saat melewati Desa Mangoldogi.*

dalam insiden tersebut. Kecurigaan tersebut dapat dimaklumi, mengingat anggota militer sebelumnya telah membakar fasilitas umum di Kabupaten Intan Jaya dalam sebuah penggerebekan di Kampung Hitadipa pada 19 September 2020.<sup>21</sup> Anggota TPNPB di Kabupaten Pegunungan Bintang mengklaim bahwa mereka menyerang dan membakar Puskesmas tersebut karena salah satu petugas kesehatan mengeluarkan senjata dan menembaki anggota mereka. TPNPB menduga petugas kesehatan tersebut berafiliasi dengan militer Indonesia.<sup>22</sup>

Aparat keamanan Indonesia merespons dengan melakukan serangan udara terhadap delapan desa yaitu Kiwi, Delpem, Lolim, Pelebib, Mangoldogi, Sopamikma, Oknanggul, dan Delmatahu pada tanggal 13 September hingga akhir Oktober 2021. Kampung-kampung tersebut tersebar di wilayah seluas 5,18 km<sup>2</sup> di Distrik Kiwirok (lihat foto di bawah). Menurut para saksi, militer menggunakan empat helikopter dalam operasi tersebut. Dua helikopter memegang posisi dan mengamati daerah tersebut, sementara dua helikopter lainnya menjatuhkan bahan peledak dan menembakkan senjata otomatis yang berat ke desa-desa. Menurut saksi,

helikopter menyerang rumah-rumah penduduk dan orang-orang yang bekerja di lahan pertanian mereka tanpa pandang bulu.

Mereka juga mengerahkan anggota pasukan keamanan tambahan ke Kiwirok. Sebagian besar ditempatkan ke Desa Mangoldogi, yang menjadi markas operasional pasukan keamanan. Penduduk setempat mengidentifikasi beberapa posisi penembak jitu di Desa Mangoldogi. Posisi-posisi tersebut masih aktif hingga Oktober 2022 (lihat foto di bawah).

Kesaksian para saksi konsisten mengenai penggunaan *drone* mata-mata untuk memantau keadaan di desa-desa sebelum pasukan darat masuk. Beberapa saksi menyatakan bahwa pasukan keamanan juga menggunakan *drone* untuk menjatuhkan granat mortir ke pemukiman penduduk asli. HRM tidak menemukan bukti visual dari *drone* yang masih aktif maupun sudah hancur yang bisa mengkonfirmasi tuduhan ini. Namun, Konversi *drone* untuk tujuan tersebut tidak sulit. *Drone* seperti ini juga digunakan dalam konflik bersenjata lainnya seperti di Ukraina. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa militer Indonesia telah mengubah *drone* untuk menjatuhkan bahan peledak selama serangan.

21 Polisi Militer menetapkan delapan tentara sebagai tersangka atas dugaan pembakaran gedung Dinas Kesehatan Intan Jaya di Desa Hitadipa, Intan Jaya. Tidak diketahui apakah investigasi tersebut berujung pada pengadilan militer. Insiden ini terkait dengan pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020.

22 Anggota polisi dan militer yang menyamar di Papua Barat sering mengikuti pekerjaan sehari-hari seperti tukang ojek atau pedagang kaki lima untuk memantau situasi di masyarakat dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan. Militer secara sistematis memperluas kehadirannya di fasilitas umum di Papua Barat, termasuk sekolah dan klinik

Semua saksi yang diwawancarai mengaku bahwa helikopter menjatuhkan bahan peledak di daerah pemukiman. Penduduk desa berhasil mengumpulkan selongsong peluru dan granat mortir yang masih utuh setelah serangan tersebut (lihat foto-foto di bawah). Sekolah, gereja, fasilitas umum desa, dan rumah-rumah penduduk rusak dan terbakar habis. Masyarakat panik dan melarikan diri ke hutan. Beberapa penduduk desa dilaporkan ditembak ketika sedang bekerja di lahan mereka saat serangan terjadi. Tidak semua warga dapat kembali ke rumah mereka dan mengambil barang-barang penting sebelum bersembunyi di tempat penampungan di hutan. Banyak yang tidak membawa apa-apa selain pakaian yang mereka kenakan. Hampir semua penduduk desa masih menjadi pengungsi internal pada Juli 2023 dan tinggal di kamp-kamp kecil di hutan dataran tinggi Pegunungan Bintang yang terpencil. Menurut daftar nama yang diterima dari para pekerja gereja dan pembela hak asasi manusia di Tanah Papua, 2.252 masyarakat adat Ngalum menjadi pengungsi internal akibat penggerebekan keamanan. Angka tersebut tidak termasuk bagi para pekerja kesehatan, guru, dan pejabat pemerintah yang selama ini bekerja di Kiwirok dan mengungsi setelah penembakan di Kiwirok terjadi.

Serangan serupa dengan baku tembak antara TPNPB dan pasukan keamanan Indonesia terus berlanjut hingga akhir Oktober 2021. Setelah itu, bentrokan bersenjata di Kiwirok tampak lebih jarang terjadi dan tidak terlalu sistematis, sementara situasi keamanan di distrik tersebut masih tegang. Pasukan keamanan Indonesia terus memantau daerah tersebut dengan ketat. Militer menempatkan penembak jitu dan pos-pos keamanan di desa-desa. Menurut para saksi mata, bangunan-bangunan umum, seperti sekolah, gereja, dan balai pertemuan desa, di desa Mangoldogi, Kiwi, dan Lolim digunakan sebagai pos-pos keamanan atau tempat tinggal bagi para anggota pasukan keamanan. Mereka dikerahkan untuk mengontrol dan mengawasi wilayah sekitar pemukiman.

Para pengungsi bersaksi bahwa personil pasukan keamanan mengambil barang-barang pribadi warga dan membunuh ternak sebelum menghancurkan rumah-rumah warga atau membakarnya hingga rata dengan tanah. Di beberapa desa, atap-atap rumah yang terbuat dari logam dan papan kayu dicopot (lihat foto-foto di bawah ini). Pasukan keamanan dilaporkan menghancurkan bagian dalam dan mengambil barang-barang pribadi. Anggota pasukan keamanan merobohkan dinding namun membiarkan atapnya tetap utuh. Hal ini mempersulit untuk mengidentifikasi kerusakan pada gambar satelit. Material yang dibongkar digunakan untuk membangun dan memperbaiki pos-pos keamanan.

Aparat keamanan melakukan penyerangan di delapan desa di Kiwirok antara tanggal 13 September hingga akhir Oktober 2021. HRM memverifikasi tiga operasi tersebut dengan menggunakan alat FIRMS *Fire Map*. Peta tersebut menunjukkan titik api di Desa Kiwi pada 13 September 2021, serta kebakaran yang lebih besar di Desa Pelebib, Oknanggul,

dan Delmatahu pada 9 Oktober 2021, serta Desa Mangoldogi, dan Sopamikma pada 16 Oktober 2021 (lihat gambar satelit FIRMS di bawah). Metode ini berguna karena para saksi tidak selalu mengingat tanggal pasti serangan. Banyak perempuan Ngalum dan orang berusia di atas 40

tahun yang buta huruf, dan waktu atau tanggal tidak memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari mereka.



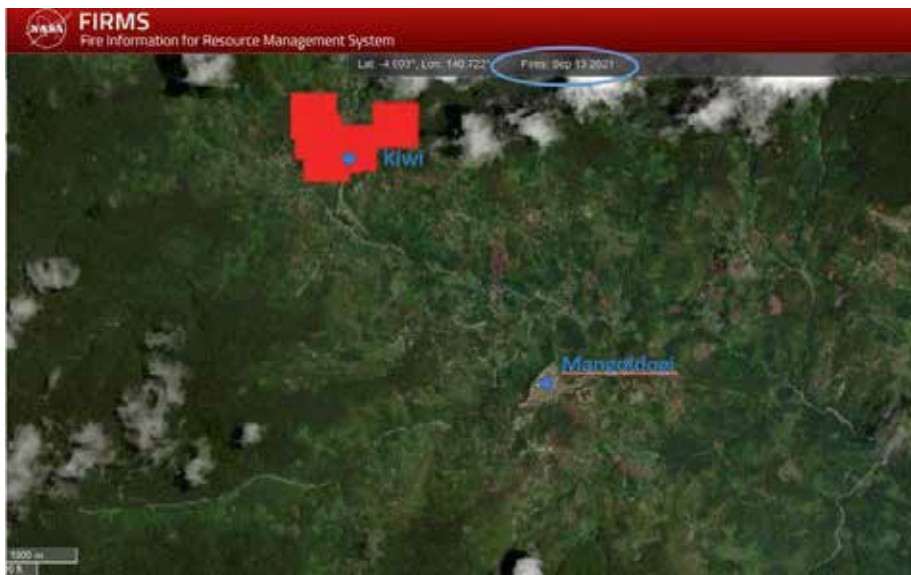


*Penduduk desa mengumpulkan mortar hijau bertanda 81mm M72 HE dan peluru amunisi setelah penggerebekan di Kiwirok. LSM Conflict Armament Research (CAR) menemukan bahwa granat mortar tersebut diproduksi oleh Krušik Holding Corporation<sup>23</sup> di Serbia<sup>24</sup> (bawah). Amunisi Indonesia berukuran 5,56 dilaporkan diproduksi oleh perusahaan pertahanan Indonesia, PT Pindad, antara tahun 2002 dan 2019 (atas). LSM Bellingcat melacak kembali asal-usul amunisi dan memberikan informasi kepada HRM.*

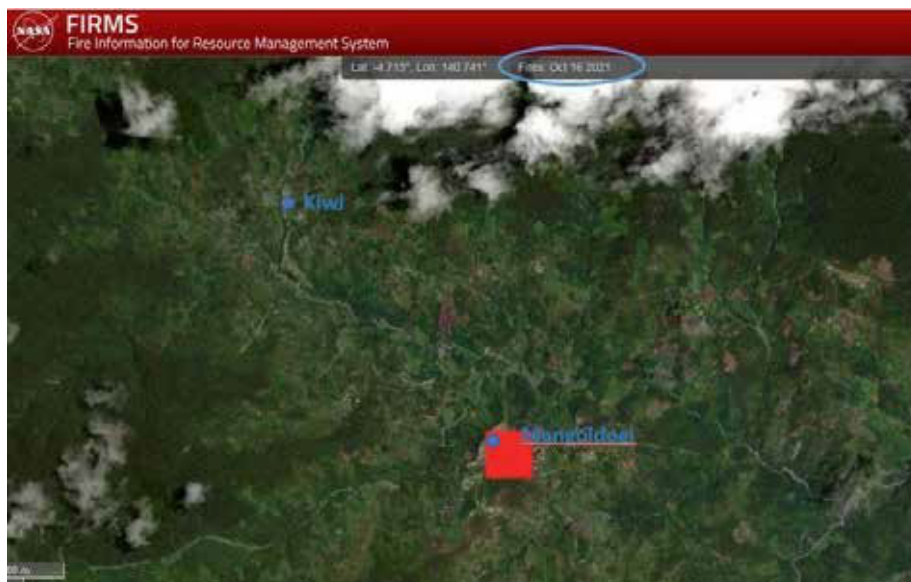
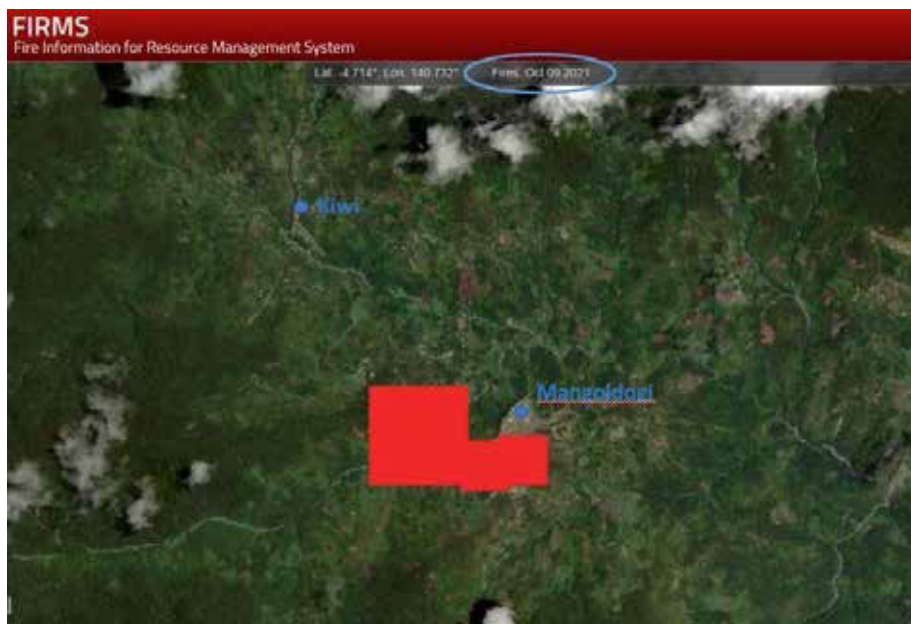
23 Krušik Holding Corporation adalah perusahaan milik negara Serbia yang memproduksi peralatan pertahanan dan peralatan sipil, dengan kantor pusat di Valjevo, Serbia.

24 Reuters (3.06. 2022), tersedia di: <https://shorturl.at/s>





*Peta Kebakaran FIRMS menunjukkan adanya kebakaran yang besar di Desa Kiwi, Distrik Kiwirok akibat serangan udara pada tanggal 13 September 2021 (atas). HRM juga menemukan bukti digital kebakaran di Distrik Kiwirok di Desa Pelebib dan Mangoldogi pada tanggal 9 Oktober 2021 (tengah) dan Desa Mangoldogi dan Sopamikma pada tanggal 16 Oktober 2021 (bawah).*





Tingkat kerusakan diselidiki melalui analisis komparatif citra satelit dari Distrik Kiwirok. Citra satelit yang digunakan untuk laporan ini berasal dari tanggal 29 September 2021, 30 April 2021, dan 3 Juni 2022. Citra satelit tersebut diperlihatkan kepada beberapa saksi untuk mengidentifikasi kerusakan dan pelaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa desa Mangoldogi, Oknanggul, Kiwi, Pelebib, Delmatahu, dan Sopamikama adalah desa yang paling terdampak oleh serangan udara. Citra satelit menunjukkan bukti visual dari kehancuran tersebut, seperti bangunan yang hancur dan bekas-bekas kebakaran. Bangunan-bangunan umum di

Desa Mangoldogi dan Kiwi dibakar habis oleh anggota TPNPB setelah pasukan keamanan Indonesia menggunakannya sebagai pos keamanan atau akomodasi. Desa Oknanggul dan Delmatahu dihancurkan seluruhnya.

HRM menggunakan analisis citra satelit, artikel media, teknologi sumber terbuka, dan kesaksian saksi untuk merekonstruksi garis waktu kejadian di Distrik Kiwirok antara 13 September hingga 23 Oktober 2021 (lihat tabel di bawah).

**Rekonstruksi kronologis kejadian serangan bersenjata di Distrik Kiwirok antara 13 September dan 23 Oktober 2021**

<p><b>13 September 2021</b></p>	<p>Seorang dokter dari Puskesmas di Mangoldogi diduga melepaskan tembakan ke arah seorang anggota TPNPB kemudian kelompok TPNPB membakar beberapa bangunan umum di Mangoldogi. Tindakan ini menyebabkan bentrokan bersenjata antara TPNPB dan militer Indonesia. Delapan petugas kesehatan dan seorang anggota militer terluka. Satu orang petugas kesehatan dan satu orang pejuang TPNPB tewas dalam insiden tersebut. (Tanggal dan lokasi kejadian diverifikasi melalui analisis metadata dari video bentrokan bersenjata dan dikonfirmasi oleh liputan media)</p> <p>Setelah bentrokan bersenjata tersebut, pasukan keamanan Indonesia melancarkan serangan udara terhadap desa Mangoldogi dan Kiwi. Granat mortir dan peluru menghancurkan rumah-rumah penduduk dan merusak berbagai bangunan di kompleks misi di Kiwi. TPNPB membalas dengan membakar gedung-gedung sekolah, balai pertemuan desa, dan pusat pelayanan kesehatan di Kiwi. Menurut TPNPB, gedung-gedung tersebut digunakan untuk menampung anggota militer karena konflik bersenjata di Pegunungan Bintang semakin meningkat (Tanggal dan lokasi kejadian diverifikasi melalui <i>Peta Kebakaran FIRMS</i> dan keterangan saksi).</p>
<p><b>21 September 2021</b></p>	<p>Bentrokan bersenjata antara anggota TPNPB dan aparat keamanan mengakibatkan tewasnya seorang anggota militer (Tanggal dan lokasi kejadian direkonstruksi berdasarkan kesaksian video dan sumber media<sup>25</sup>)</p>
<p><b>22 -25 September 2021</b></p>	<p>Menurut sumber media,<sup>26</sup> anggota pasukan keamanan mulai mengerahkan personel pasukan keamanan tambahan dan mengevakuasi warga sipil non-Papua dari Mangoldogi</p>
<p><b>26 September 2021</b></p>	<p>Menurut sumber media<sup>27</sup>, bentrokan bersenjata antara TPNPB dan aparat keamanan terjadi di dekat lapangan terbang di Mangoldogi. Satu anggota polisi tewas.</p>

25 Viva CO.ID (21.09.2021): Pratu TNI Ida Bagus Gugur Ditembak Teroris OPM, tersedia di: [https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1406582-pratu-tni-ida-bagus-gugur-ditembak-teroris-opm?page=all&utm\\_medium=all-page](https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1406582-pratu-tni-ida-bagus-gugur-ditembak-teroris-opm?page=all&utm_medium=all-page); Detik News (23.09.2021): Pratu Ida Bagus Putu yang Gugur Ditembak KKB Papua Naik Pangkat Anumerta, tersedia di: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5736369/pratu-ida-bagus-putu-yang-gugur-ditembak-kkb-papua-naik-pangkat-anumerta>

26 Kompas Regional (25.09.2021): TNI-Polri Kuasai Bandara Kiwirok, 17 Warga Berhasil Dievakuasi, tersedia di: <https://regional.kompas.com/read/2021/09/25/093335978/tni-polri-kuasai-bandara-kiwirok-17-warga-berhasil-dievakuasi?page=all>; VOI.ID (25.09.2021): Satgas Nemangkawi Gelar Operasi Penindakan KKB di Kiwirok Papua tersedia di: <https://voi.id/aktual/88543/satgas-nemangkawi-gelar-operasi-penindakan-kkb-di-kiwirok-papua>

27 Republika (26.09.2023): Kontak Senjata di Kiwirok Papua, 1 Personel Brimob Gugur, tersedia di: <https://news.republika.co.id/berita/r01443438/kontak-senjata-di-kiwirok-papua-1-personel-brimob-gugur>;



<b>28 September 2021</b>	Menurut sumber media, <sup>28</sup> bentrokan bersenjata antara TPNPB dan aparat keamanan kembali terjadi di dekat lapangan terbang di Mangoldogi. Dua anggota polisi tewas.
<b>13 - 29 September 2021</b>	Aparat keamanan merespons dengan melakukan penggerebekan di desa Mangoldogi, Oknanggul, Delmatahu, Pelebib dan Sopamikma dengan menggunakan pasukan darat dan helikopter, menembaki dengan senapan otomatis, dan menjatuhkan granat mortir ke rumah-rumah penduduk (Periode waktu dan lokasi kejadian diverifikasi melalui analisis citra satelit komparatif dan kesaksian para saksi)
<b>9 Oktober 2021</b>	Anggota pasukan keamanan menyerbu desa Pelebib, Oknanggul, dan Delmatahu dengan menggunakan pasukan darat dan helikopter, menembak dengan senapan mesin dan menjatuhkan granat mortir ke rumah-rumah warga (Tanggal dan lokasi kejadian diverifikasi melalui FIRMS <i>Fire Map</i> )
<b>10-14 Oktober 2021</b>	Anggota pasukan keamanan menyerbu desa Oknanggul dan Delmatahu dengan menggunakan pasukan darat dan helikopter, menembak dengan senapan mesin, dan menjatuhkan granat mortir ke rumah-rumah penduduk (Periode waktu dan lokasi kejadian direkonstruksi berdasarkan kesaksian para saksi)
<b>15 Oktober 2021</b>	Anggota pasukan keamanan dilaporkan membakar bangunan di Desa Mangoldogi (Seorang penduduk desa merekam pembakaran di Mangoldogi, dan bersaksi bahwa anggota pasukan keamanan bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. Tanggal ditampilkan dalam rekaman tersebut).
<b>16 Oktober 2021</b>	Anggota pasukan keamanan menyerbu desa Sopamikma dan Mangoldogi dengan menggunakan pasukan darat dan helikopter, menembak dengan senapan otomatis dan menjatuhkan granat mortir ke rumah-rumah penduduk (Tanggal dan lokasi kejadian diverifikasi melalui FIRMS <i>Fire Map</i> )
<b>18 Oktober 2021</b>	Anggota pasukan keamanan mengerahkan anggota pasukan keamanan tambahan dengan menggunakan tiga helikopter (Tanggal dan lokasi kejadian diverifikasi melalui analisis metadata dari video yang menunjukkan anggota TPNPB sedang memantau Kampung Mangoldogi).
<b>14-21 Oktober 2021</b>	Menurut sumber media <sup>29</sup> yang mengutip Juru Bicara TPNPB Seby Sambom, anggota pasukan keamanan menyerbu desa Lolim, Delpem, dan Pelebib dengan menggunakan pasukan darat dan helikopter, menembaki dengan senapan otomatis dan menjatuhkan granat mortir ke rumah-rumah penduduk (belum diverifikasi)
<b>23 Oktober 2021</b>	Anggota pasukan keamanan dilaporkan membakar bangunan di Desa Mangoldogi (Tanggal dan lokasi kejadian diverifikasi melalui analisis metadata dari sebuah foto yang menunjukkan rumah-rumah yang terbakar dan asap tebal di Mangoldogi)

Detik News (26.09.2021): Sosok Bharatu Kurniadi, Anggota Brimob Gugur Ditembak KKB di Papua, tersedia di: <https://news.detik.com/berita/d-5740896/sosok-bharatu-kurniadi-anggota-brimob-gugur-ditembak-kkb-di-papua>

28 Medius News (28.09.2021): KKB Kembali Menyerang Kiwirok, Dua Anggota Polri Tertembak, 1.000-an Warga Mengungsi, tersedia di: <https://www.mediusnews.com/nasional/pr-1321289226/kkb-kembali-menyerang-kiwirok-dua-anggota-polri-tertembak-1000-an-warga-mengungsi?page=all>;

Serambi News (28.09.2023): Lagi, 2 Anggota Polisi Tertembak dalam Kontak Senjata dengan KKB Papua di Distrik Kiwirok, tersedia di: <https://aceh.tribunnews.com/2021/09/28/lagi-2-anggota-polisi-tertembak-dalam-kontak-senjata-dengan-kkb-papua-di-distrik-kiwirok>

29 Keadilan Hukum (25.10.2021): Helikopter TNI-Polri Disebut Bombardir 4 Kampung di Pegunungan Bintang, tersedia di: <https://www.law-justice.co/artikel/118551/helikopter-tni-polri-disebut-bombardir-4-kampung-di-pegunungan-bintang/>; Tempo (23.10.2023): Sejumlah Organisasi Sebut Aparat Diduga Bombardir Kiwirok, Warga Mengungsi, tersedia di: <https://nasional.tempo.co/read/1520461/sejumlah-organisasi-sebut-aparat-diduga-bombardir-kiwirok-warga-mengungsi>

## 7. Analisa Perbandingan Gambar Satelit

Bagian berikut ini memberikan analisis rinci tentang kerusakan di delapan desa tersebut. Identifikasi bangunan dan pelaku dilakukan bersama dengan para saksi dengan menggunakan gambar satelit dari tanggal 3 Juni 2022, 29 September 2021, dan 30 April 2021. Gambar satelit tersebut disediakan oleh European Space Imaging (EUSI).

### Desa Mangoldogi



*Foto udara Desa Mangoldogi sebelum (kiri atas) dan sesudah penggerebekan (kanan atas). Pembakaran rumah di Mangoldogi, setelah bentrokan bersenjata antara TPNPB dan aparat keamanan Indonesia pada 13 September 2021 (kiri bawah). Analisis metadata dari foto sebelah kiri menunjukkan bahwa foto tersebut diambil pada 23 Oktober 2021, 07:59:23 (kanan bawah)*



"Hancurkan mereka terlebih dahulu... diskusikan hak asasi manusia kemudian."

---



*Perbandingan: Citra satelit Desa Mangoldogi pada tanggal 30 April 2021 (kiri) dan 29 September 2021 (kanan)*



*Citra satelit Desa Mangoldogi yang diambil pada tanggal 3 Juni 2022*





*Citra satelit Desa Mangoldogi, diambil pada 29 September 2021. Menurut keterangan saksi, rumah-rumah di Mangoldogi dibakar habis oleh anggota TPNPB dan aparat keamanan Indonesia:*

- 1. Tiga bangunan SD Inpres Polobakon dibakar oleh anggota TPNPB karena anggota militer diduga menggunakan sekolah tersebut sebagai pos keamanan*
- 2. Rumah guru terbakar habis setelah terkena granat mortir selama serangan udara*
- 3. Dua rumah warga hangus terbakar setelah terkena granat mortir selama serangan udara*
- 4. Puskesmas Kiwirok dibakar habis oleh anggota TPNPB pada tanggal 13 September 2021 setelah anggota TPNPB menuduh petugas kesehatan menembaki mereka*
- 5. Dua rumah tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas Kiwirok dibakar habis oleh anggota pasukan keamanan selama penggerebekan.*
- 6. Pasar Kiwirok terbakar habis pada 13 September 2021 setelah api menjalar dari bangunan di sekitarnya*
- 7. Dua rumah milik pemerintah untuk pegawai negeri sipil dibakar habis oleh aparat keamanan*
- 8. Gedung Kantor Bersama Bank Papua dan Kantor Distrik dibakar oleh anggota TPNPB pada tanggal 13 September 2021 setelah anggota TPNPB menuduh petugas kesehatan menembaki mereka*
- 9. Kediaman Kepala Distrik Kiwirok terbakar habis setelah terkena granat mortir selama serangan udara*
- 10. Kantor Imigrasi dibakar oleh anggota TPNPB*
- 11. Dua gedung SMP Kiwirok dibakar oleh anggota TPNPB karena anggota militer diduga menggunakan sekolah tersebut sebagai pos keamanan*



Citra satelit Desa Mangoldogi, diambil pada 3 Juni 2022. Menurut keterangan saksi, rumah-rumah di Mangoldogi dibakar habis oleh anggota TPNPB dan aparat keamanan Indonesia setelah tanggal 30 September 2021:

1. Tiga bangunan SD Inpres Polobakon dibakar oleh anggota TPNPB sebelum tanggal 29 September 2021
2. Sebelas bangunan perumahan guru terbakar habis setelah dihantam granat mortir dalam serangan udara
3. Rumah guru terbakar habis setelah terkena granat mortir dalam serangan udara pasukan keamanan sebelum 29 September 2021
4. Sepuluh rumah warga terbakar habis setelah terkena granat mortir selama serangan udara pasukan keamanan, dua di antaranya sebelum 29 September 2021
5. Gereja Jemaat GIDI Yerikho sebagian hancur setelah terkena granat mortir selama serangan udara
6. Rumah tinggal terbakar habis setelah terkena granat mortir selama serangan udara pasukan keamanan
7. Rumah tinggal terbakar habis setelah terkena granat mortir selama serangan udara pasukan keamanan
8. Tiga rumah petugas kesehatan yang bekerja di Puskesmas Kiwirok terbakar habis setelah terkena granat mortir dalam serangan udara
9. Rumah dokter dibakar habis oleh aparat keamanan
10. Puskesmas Kiwirok dibakar habis oleh anggota TPNPB pada tanggal 13 September 2021 setelah anggota TPNPB menuduh petugas kesehatan menembaki mereka
11. Gereja Ekumenis Kiwirok terbakar habis setelah dihantam granat mortir selama serangan udara
12. Tiga rumah milik pemerintah dibakar habis oleh anggota pasukan keamanan
13. Empat bangunan Puskesmas Kiwirok yang lama dibakar habis oleh aparat keamanan
14. Dua rumah tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas Kiwirok dibakar habis oleh anggota pasukan keamanan selama penggerebekan sebelum 29 September 2021



15. *Pasar Kiwirok terbakar habis setelah api menyebar dari bangunan di sekitarnya sebelum 29 September 2021*
16. *Empat rumah milik pemerintah untuk pegawai negeri sipil dibakar habis oleh anggota pasukan keamanan, dua di antaranya sebelum 29 September 2021*
17. *Gedung Kantor Bersama Bank Papua dan Kantor Distrik dibakar oleh TPNPB pada tanggal 13 September 2021 setelah anggota TPNPB menuduh petugas kesehatan menembaki mereka pada tanggal 13 September 2021 setelah anggota TPNPB menuduh petugas kesehatan menembaki mereka*
18. *Kantor Imigrasi dibakar oleh anggota TPNPB sebelum tanggal 29 September 2021*
19. *Kediaman Kepala Distrik Kiwirok terbakar habis setelah terkena granat mortir selama serangan udara*
20. *Gereja Jemaat GIDI Imanuel Polobakon diduduki oleh anggota pasukan keamanan dan digunakan sebagai pos. Para pengungsi bersaksi bahwa mereka telah melihat laser pointer yang digunakan oleh penembak jitu Indonesia yang berasal dari lubang di atap.*
21. *Kantor Kementerian Perhubungan di Kiwirok terbakar habis setelah dihantam granat mortir dalam sebuah serangan udara*
22. *Tujuh rumah penduduk desa Sopamikma terbakar habis setelah terkena granat mortir dalam sebuah serangan udara*
23. *Dua bangunan SMP Kiwirok dibakar habis oleh anggota TPNPB karena anggota militer diduga menggunakan sekolah tersebut sebagai pos keamanan. Para saksi mata menyatakan bahwa mereka telah melihat penembak jitu laser yang digunakan oleh penembak jitu Indonesia*
24. *Anggota pasukan keamanan merusak dan membongkar semua bangunan di sebuah perumahan guru sekolah menengah. Interior dan bahan bangunan digunakan untuk membangun pos keamanan.*

## Desa Pelebib



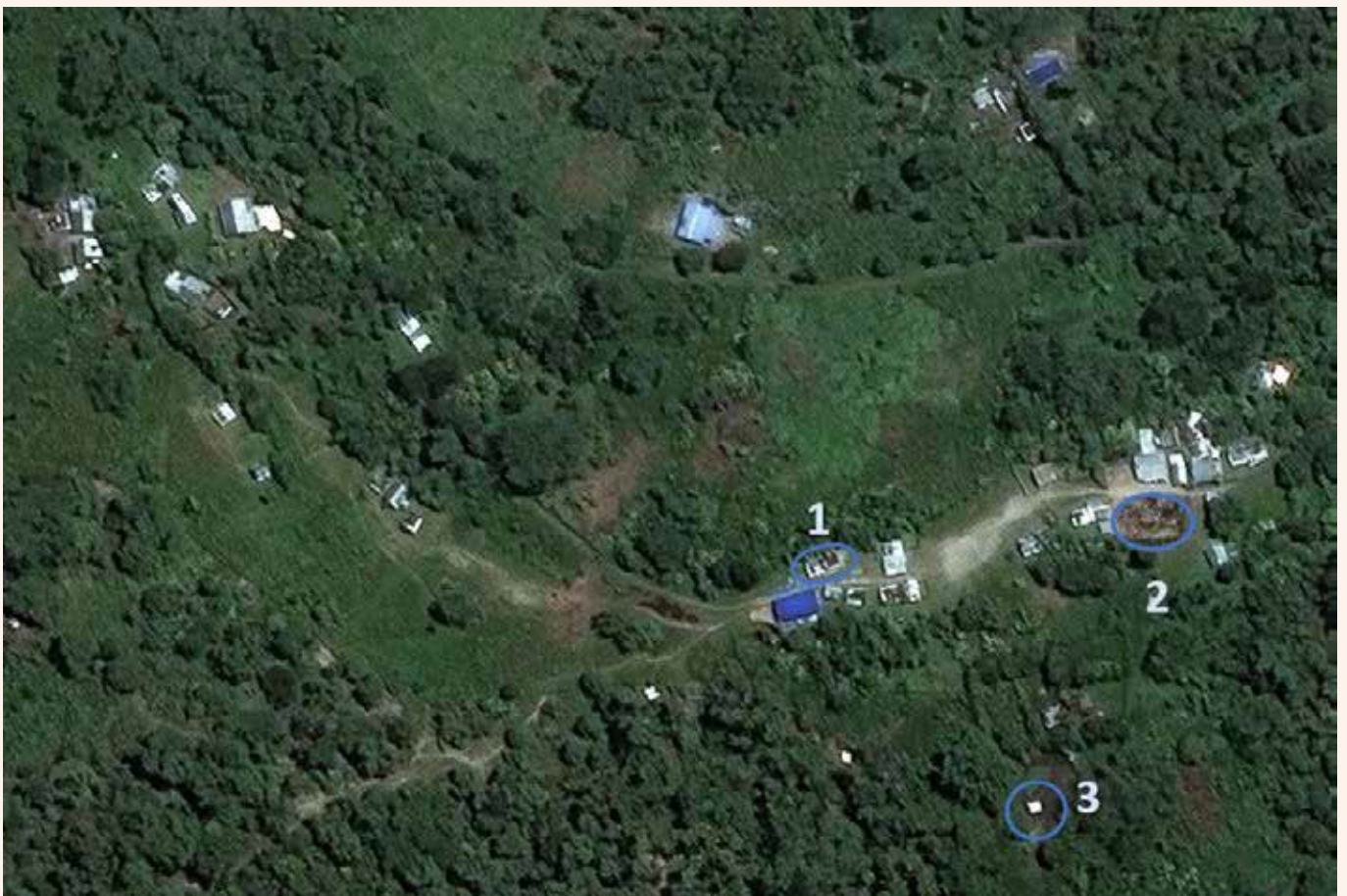
*Kebakaran yang terjadi di Desa Pelebib. Saksi mata menyatakan bahwa foto tersebut diambil saat penggerebekan pada tanggal 15 atau 16 September 2021. Analisis metadata gagal merekonstruksi tanggal pembuatan file jpg tersebut.*



"Hancurkan mereka terlebih dahulu... diskusikan hak asasi manusia kemudian."



*Desa Pelebib pada tanggal 30 April 2021, sebelum beroperasi*



*Penghancuran di Desa Pelebib antara 13 dan 29 September 2021 (foto tanggal 29 September 2021):*

1. *Bangunan tempat tinggal yang terbakar habis setelah anggota militer menjatuhkan granat mortir ke rumah tersebut, yang diduga menggunakan pesawat tanpa awak.*
2. *Balai pertemuan desa dibakar oleh anggota aparat keamanan*
3. *Kandang babi milik Bapak Yahya Tepmul, di mana ia dilaporkan ditembak mati oleh seorang penembak jitu Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2022.*





*Kerusakan di Desa Pelebib yang terjadi setelah tanggal 29 September 2021 (foto diambil pada tanggal 3 Juni 2022):*

1. Lima rumah penduduk dibakar habis oleh pasukan keamanan Indonesia. Salah satu rumah dihancurkan oleh granat mortir selama serangan udara sebelum 29 September 2021
2. Balai Pertemuan Desa dibakar habis oleh aparat keamanan
3. Lima rumah penduduk dibakar habis oleh anggota pasukan keamanan Indonesia
4. Dua rumah warga dibakar habis oleh aparat keamanan Indonesia
5. Satu rumah tinggal dibakar habis oleh anggota pasukan keamanan Indonesia
6. Rumah milik Bapak Yahya Tepmul dibakar habis oleh aparat keamanan. Bapak Tepmul dilaporkan ditembak mati oleh penembak jitu Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2022
7. Empat rumah penduduk dibakar habis oleh anggota pasukan keamanan Indonesia
8. Anggota pasukan keamanan menghancurkan rumah-rumah dan membunuh ternak di daerah pemukiman ini. Mereka mengambil interior dan bahan bangunan untuk membangun pos keamanan.
9. Dua rumah warga dibakar habis oleh aparat keamanan Indonesia
10. Dua rumah warga dibakar habis oleh aparat keamanan Indonesia
11. Satu rumah tinggal dibakar habis oleh anggota pasukan keamanan Indonesia



## Desa Kiwi



Kompleks pendidikan (kiri) dan kompleks misi Kristen (kanan) di Desa Kiwi pada tanggal 30 April 2021 sebelum operasi dimulai



Penghancuran di Desa Kiwi antara 13 dan 29 September 2021 (foto kompleks pendidikan yang diambil pada 29 September 2021):

1. Tiga gedung sekolah SMP YPPGI Katop Bakon dibakar habis oleh anggota TPNPB karena anggota TNI menggunakan sekolah tersebut sebagai posko keamanan
2. Dua rumah guru SMA dibakar habis oleh anggota TPNPB setelah bangunan tersebut digunakan untuk menampung anggota militer
3. Tiga gedung sekolah dasar dibakar habis oleh anggota TPNPB karena digunakan sebagai posko oleh anggota militer
4. Dua rumah guru dibakar habis oleh anggota TPNPB setelah bangunan tersebut digunakan untuk menampung anggota militer
5. Balai pertemuan kampung dibakar habis oleh anggota TPNPB karena aparat keamanan gabungan menggunakan gedung tersebut sebagai posko
6. Puskesmas Pembantu (Pustu) dibakar habis oleh anggota TPNPB setelah bangunan tersebut digunakan untuk menampung anggota militer





*Penghancuran di Desa Kiwi antara 13 dan 29 September 2021 (foto kompleks misi yang diambil pada 29 September 2021):*

7. Rumah pendeta terkena granat mortir selama serangan udara. Granat itu tidak meledak. Granat itu kemudian dipindahkan dan disimpan oleh penduduk desa setempat.
8. Satu rumah rusak akibat granat mortir selama serangan udara
9. Kompleks misi di Desa Kiwi. Beberapa rumah dilaporkan rusak akibat peluru selama serangan udara pada 13 September 2021.
10. Rumah-rumah penduduk di Desa Kiwi diserang dengan tembakan selama serangan udara. Granat mortir dilaporkan merusak beberapa rumah selama serangan tersebut

## Desa Oknanggul



*Desa Oknanggul pada tanggal 30 April 2021 sebelum beroperasi*





*Kerusakan di Desa Oknanggul antara 13 dan 29 September 2021 (foto diambil pada 29 September 2021):*

- 1. Balai pertemuan kampung dibakar habis oleh anggota TPNPB karena anggota militer menggunakan bangunan tersebut sebagai pos*
- 2. Satu rumah warga terkena granat mortir TNI dan hangus terbakar*
- 3. Satu rumah warga terkena granat mortir TNI dan hangus terbakar*
- 4. Tiga rumah warga terkena granat mortir TNI dan terbakar habis*
- 5. Satu rumah warga terkena granat mortir TNI dan sebagian terbakar habis*





*Sembilan belas bangunan di Desa Oknanggul, sebagian besar rumah tinggal, dihancurkan oleh aparat keamanan gabungan setelah tanggal 29 September 2021 (foto diambil pada tanggal 3 Juni 2022). Aparat keamanan menjarah rumah-rumah tersebut sebelum membakarnya hingga rata dengan tanah. Bangunan-bangunan tersebut ditandai dengan lingkaran putih. Tujuh bangunan yang dihancurkan antara 13 dan 29 September 2021 ditandai dengan lingkaran merah.<sup>30</sup>*

30 European Space Imaging (EUSI), penyedia gambar satelit, mengidentifikasi titik putih pada citra tersebut sebagai suar. Flare adalah area piksel jenuh yang disebabkan oleh tingginya pantulan dari fitur tanah membanjiri detektor sensor. Muatan elektronik pada detektor terkadang meluap dan memengaruhi detektor di sekelilingnya sampai muatan yang berlebihan diredam. Pantulan yang tinggi dari fitur di permukaan tanah merupakan fungsi dari sudut fitur relatif terhadap sudut matahari dan sudut pengambilan gambar.



## Desa Delmatahu



*Perbandingan: Desa Delmatahu pada 30 April 2021 (atas), 29 September 2021 (tengah), dan 3 Juni 2022 (bawah)*





*Perusakan di Desa Delmatahu antara tanggal 13 dan 29 September 2021:*

- 1. Dua rumah warga terkena granat mortir saat razia keamanan dan terbakar habis*
- 2. Balai pertemuan desa dibakar habis oleh aparat keamanan gabungan*
- 3. Rumah warga terkena granat mortir dan terbakar habis*
- 4. Empat kandang babi dibakar habis oleh anggota pasukan keamanan. Semua ternak dibunuh dan digunakan untuk konsumsi personel keamanan*



*Tiga puluh dua bangunan di Desa Delmatahu, sebagian besar adalah rumah tinggal, dihancurkan oleh pasukan keamanan gabungan setelah 30 September 2021. Nomor 5 menandai empat kandang babi yang dihancurkan, dan hewan-hewan ternak dibunuh.*

*Aparat keamanan dilaporkan menjarah rumah-rumah tersebut sebelum membakarnya. Bekas bangunan telah ditandai dengan lingkaran putih. Balai pertemuan desa, dua rumah penduduk, dan empat kandang babi yang dihancurkan antara tanggal 13 dan 29 September 2021 ditandai dengan lingkaran merah.*



## Desa Sopamikma



*Perbandingan: Desa Sopamikma pada 30 April 2021 (atas), 29 September 2021 (tengah), dan 3 Juni 2022 (bawah)*







*Perusakan di Desa Sopamikma antara tanggal 13 dan 29 September 2021:*

- 1. Bangunan SMA Kiwirok dibakar habis oleh anggota militer*
- 2. Bangunan SMA Kiwirok dibakar habis oleh anggota militer*
- 3. Bangunan SMA Kiwirok dibakar habis oleh anggota militer*
- 4. Tiga rumah guru sekolah menengah atas dibakar habis oleh anggota militer*
- 5. Satu rumah tinggal dibakar habis oleh anggota militer*



*Enam rumah warga di Desa Sopamikma dihancurkan oleh aparat keamanan gabungan setelah 30 September 2021. Aparat keamanan dilaporkan menjarah rumah-rumah tersebut sebelum membakarnya hingga rata dengan tanah. Bangunan-bangunan tersebut ditandai dengan lingkaran putih. Tujuh bangunan yang dihancurkan antara tanggal 13 dan 29 September 2021 ditandai dengan lingkaran merah.*



"Hancurkan mereka terlebih dahulu... diskusikan hak asasi manusia kemudian."

---



*Perbandingan: Dusun Kotobip di Desa Sopamikma pada 30 April 2021 (atas), 29 September 2021 (tengah), dan 3 Juni 2022 (bawah)*

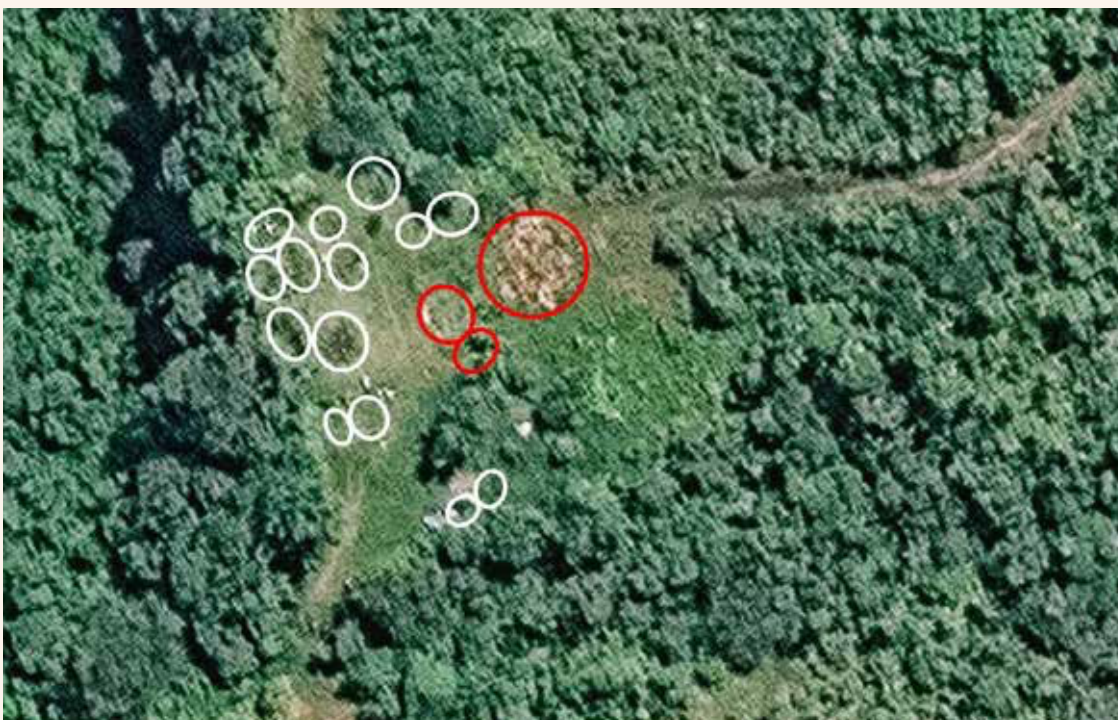






*Pengrusakan di Dusun Kotobip, sebelah utara Kampung Sopamikma, antara tanggal 13 dan 29 September 2021:*

- 1. Satu gedung kantor rumah pameran budaya dibakar habis oleh anggota militer*
- 2. Satu gedung kantor rumah pameran budaya dibakar habis oleh anggota militer*
- 3. Satu rumah pameran budaya dibakar habis oleh anggota militer*



*Empat belas rumah warga di Dusun Kotobib, sebelah utara Kampung Sopamikma, dihancurkan oleh aparat keamanan gabungan pada 30 September 2021. Aparat keamanan menjarah rumah-rumah tersebut sebelum membakarnya hingga rata dengan tanah. Bangunan-bangunan tersebut ditandai dengan lingkaran putih. Gedung pameran budaya dan dua gedung perkantoran yang dihancurkan antara tanggal 13 dan 29 September 2021 ditandai dengan lingkaran merah.*



## Desa Delpem



*Perbandingan: Desa Delpem pada tanggal 30 April 2021 (atas), 29 September 2021 (tengah), dan 3 Juni 2022 (bawah)*







*Penghancuran di Desa Delpem antara tanggal 13 dan 29 September 2021. Satu rumah warga hancur akibat granat mortir dalam serangan udara*



*Sembilan rumah warga di Kampung Delpem dihancurkan oleh aparat keamanan gabungan setelah tanggal 30 September 2021. Aparat keamanan menjarah rumah-rumah tersebut sebelum membakarnya hingga rata dengan tanah. Bangunan-bangunan tersebut ditandai dengan lingkaran putih. Rumah tinggal yang dihancurkan antara tanggal 13 dan 29 September 2021 ditandai dengan lingkaran merah.*



## Desa Lolim



*Perbandingan: Desa Lolim pada tanggal 30 April 2021 (atas), 29 September 2021 (tengah), dan 3 Juni 2022 (bawah)*







*Penghancuran di Desa Lolim antara tanggal 13 dan 29 September 2021:*

- 1. Balai pertemuan desa dan bangunan di sebelahnya dibakar oleh anggota TPNPB karena anggota militer menggunakan bangunan tersebut sebagai markas. Saksi mata mengatakan bahwa kampung tersebut diserang secara besar-besaran selama serangan udara dengan tembakan senapan mesin, yang mengakibatkan kerusakan yang lebih sedikit terlihat di Desa Lolim dibandingkan dengan desa-desa lainnya.*



*Satu rumah warga di Kampung Lolim dihancurkan oleh aparat keamanan gabungan setelah tanggal 30 September 2021. Aparat keamanan menjarah dan menghancurkan rumah-rumah tersebut. Rumah yang dihancurkan ditandai dengan lingkaran putih. Balai pertemuan desa dan bangunan di sekitarnya yang dihancurkan antara tanggal 13 dan 29 September 2021 ditandai dengan lingkaran merah.*

## 8. Konsekuensi dari Operasi Keamanan

**A**nalisa citra satelit menunjukkan bahwa 206 bangunan di delapan desa hancur selama bentrokan bersenjata dan operasi pasukan keamanan berikutnya di Kiwirok antara 13 September dan akhir Oktober 2021. Angka-angka tersebut tidak termasuk kandang babi dan bangunan kecil yang digunakan sebagai gudang atau toilet. Tabel di bawah ini menggambarkan bahwa anggota pasukan keamanan gabungan melakukan sebagian besar dari semua kerusakan. Anggota TPNPB membakar fasilitas umum seperti puskesmas, gedung sekolah, dan balai pertemuan desa, dengan dugaan bahwa anggota aparat keamanan menggunakan bangunan umum tersebut sebagai posko atau akomodasi. Hampir semua bangunan di kampung Pelebib, Delmatahu, Oknanggul dan Mangoldogi dihancurkan. Informasi mengenai pelaku perusakan (TNI/Polri atau TPNPB) diperoleh dari keterangan para saksi.

HRM tidak menerima laporan tentang pembunuhan di luar hukum sebagai akibat langsung dari penggerebekan keamanan di Kiwirok yang terjadi antara 13 September 2021 dan akhir Oktober 2021. Namun, data yang dikumpulkan oleh para pekerja gereja dan pembela HAM menunjukkan bahwa 2.252 pengungsi dari distrik Kiwirok, Kiwirok Timur, Okhika, dan Okbantau mengungsi secara internal sebagai akibat dari operasi keamanan tersebut. Angka tersebut tidak termasuk guru, petugas kesehatan, dan pegawai negeri sipil yang selama ini tinggal dan bekerja di Kiwirok. Sekitar 103 pengungsi dilaporkan telah menyeberangi perbatasan ke Papua Nugini, di mana mereka terus tinggal di kamp. Mayoritas pengungsi dari Kiwirok tinggal di tempat penampungan sementara tanpa akses ke air bersih, makanan, pakaian hangat, pendidikan dan perawatan kesehatan. Para pengungsi di Kabupaten Pegunungan Bintang harus menghadapi kondisi cuaca ekstrem di dataran tinggi bagian tengah.

Kamp-kamp ini terletak di hutan terpencil dan hanya dapat diakses melalui

**Tabel: Total kerusakan yang dipilah berdasarkan aktor dan desa**

No.	Nama-nama desa yang diserang	Rumah-rumah tempat tinggal yang dihancurkan oleh		Gereja, sekolah, & bangunan umum lainnya yang dihancurkan oleh		Jumlah bangunan tempat tinggal yang dihancurkan
		TNI/Polri	TPNPB	TNI/Polri	TPNPB	
1	Mangoldogi	19	0	33	9	61
2	Pelebib	23	0	1	0	24
3	Kiwi	4	0	1	12	17
4	Oknanggul	25	0	0	1	26
5	Delmatahu	34	0	1	0	35
6	Sopamikma	21	0	9	0	30
7	Delpem	10	0	0	0	10
8	Lolim	1	0	0	2	3
						<b>206</b>



jalan setapak yang kecil. Di antara para pengungsi terdapat banyak wanita dan anak-anak. Tempat penampungan yang penuh sesak membuat para pengungsi rentan terhadap penyakit menular. Tidak ada toilet atau fasilitas cuci tangan dan tidak ada sabun atau perlengkapan kebersihan lainnya. Tempat penampungan

tidak menjamin perlindungan yang memadai dari cuaca dingin dan hujan di dataran tinggi tengah Papua. Kondisi di tempat penampungan terutama mempengaruhi wanita hamil, anak-anak, dan lansia (lihat foto di bawah).



*Para pengungsi dari Desa Kiwi telah mendirikan tempat perlindungan di hutan. Pekerja gereja Papua mengunjungi para pengungsi pada Oktober 2021 (foto di atas dan tengah, sumber: Dewan Gereja Papua Barat). Tak lama setelah serangan, banyak tempat penampungan yang penuh sesak seperti kamp yang didirikan oleh para pengungsi dari Distrik Okhika (foto di bagian bawah, sumber: Persekutuan Gereja-Gereja di Papua Barat)*

Para pekerja gereja mengunjungi enam kamp pengungsian sementara di Kabupaten Pegunungan Bintang pada bulan Oktober 2022 dan mengumpulkan data, yang menyebut bahwa 50 pengungsi telah meninggal sejak mengungsi. Setidaknya 39 pengungsi menderita sakit karena tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan. Angka-angka tersebut diperbarui pada 23 Juli 2023, termasuk 21 pengungsi yang meninggal pada tahun 2023.<sup>31</sup> Banyak perempuan yang melahirkan di pengungsian tanpa bantuan tenaga kesehatan. Anak-anak di kamp-kamp tidak memiliki akses pendidikan. Para pengungsi berada dalam bahaya karena penembak jitu terus beroperasi di Distrik Kiwirok. Pada tanggal 27 Oktober 2022, penembak jitu Indonesia menembak mati Bapak Yahya Tepul di Desa Pelebib,<sup>32</sup> di mana ia ingin mencari babinya. Lokasi pembunuhan ditandai pada gambar satelit dari Desa Pelebib di bagian sebelumnya.

Pemerintah daerah mendorong upaya untuk memukimkan kembali para pengungsi di desa mereka, meskipun situasi keamanan di Distrik Kiwirok masih tegang. Menurut polisi,<sup>33</sup> sekitar dua puluh pengungsi dari Distrik Kiwirok, termasuk delapan kepala desa dan petugas medis, dimukimkan kembali pada akhir November 2022. Mereka telah tinggal di kota terbesar di Pegunungan Bintang, Oksibil, bersama sekitar 500 pengungsi selama 14 bulan. Aparat keamanan gabungan mendampingi mereka untuk menjamin keamanan mereka di desa. Sebagian besar pengungsi menolak untuk kembali ke desa mereka. Beberapa desa telah dibakar habis dan beberapa bangunan umum masih diduduki oleh anggota pasukan keamanan.

Wawancara dengan para pengungsi di enam tempat penampungan menunjukkan bahwa para pengungsi Kiwirok masih terisolasi dari akses kemanusiaan oleh pemerintah sejak mereka mengungsi pada pertengahan September 2021. Kehadiran militer yang besar di daerah tersebut dan kebijakan Pemerintah Indonesia menghalangi organisasi kemanusiaan internasional untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi.

## 9. Kesimpulan

Apakah serangan militer Indonesia di Distrik Kiwirok dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan dapat dinilai dengan menguji temuan-temuan dalam laporan ini dengan elemen-elemen karakteristik sesuai dengan definisi kejahatan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma. Tidak semua unsur dapat diterapkan dalam konteks operasi pasukan keamanan di Kiwirok. Unsur-unsur yang relevan dari definisi tersebut adalah:

1. Serangan yang meluas dan sistematis
2. Ditujukan kepada penduduk sipil
3. "Dengan pengetahuan tentang serangan"
4. Tindakan yang berkaitan dengan pembunuhan (Pasal 7 (1) (a)), pemusnahan (Pasal 7, (1) (b)), atau deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7, (1) (d))

### 1. Serangan yang meluas dan sistematis

Interpretasi dari aspek meluas menekankan pada cakupan geografis dan masifnya jumlah korban. Sedangkan untuk unsur sistematis, implementasi kebijakan ditunjukkan melalui adanya pola dan metode yang sama dan berulang-ulang yang diterapkan pada desa-desa yang berbeda di wilayah yang luas. Pemenuhan kedua unsur tersebut dapat dinilai dari peralatan militer yang digunakan untuk menyerang delapan kampung adat di Distrik Kiwirok.

Penilaian menggunakan pertanyaan-pertanyaan panduan ini:

- Mungkinkah serangan yang melibatkan helikopter dan pesawat tak berawak dapat dilakukan tanpa koordinasi dan perencanaan yang matang?

31 Gereja Gidi (23.07.2023): Data Orang Meninggal Di Lokasi Pengungsian Berjumlah 74 Orang (21 Orang Yang Sudah Lengkap Datanya) Dari Kiwirok Pegunungan Bintang, Bulan April - Juli 2023

32 Pemantau Hak Asasi Manusia (15.11.2022): Penembak jitu menembak mati Yahya Tepmul di Desa Pelebib, Pegunungan Bintang, tersedia

di: <https://humanrightsmonitor.org/case/sniper-shoots-dead-mr-yahya-tepmul-di-desa-pelebib-pegunungan-bintang/>

33 Jubi (03.12.2022): Pengungsi kembali ke Kiwirok, Satgas Damai Cartenz kirim tenaga kesehatan, tersedia di: <https://jubi.id/tanah-papua/2022/pengungsi-kembali-ke-kiwirok-satgas-damai-cartenz-kirim-tenaga-kesehatan/>



- Apakah serangan terhadap desa-desa adat terkoordinasi dengan baik dan proporsional dalam hal kekuatan yang digunakan dan dampaknya terhadap penduduk sipil?
- Apakah serangan udara dilakukan secara tepat untuk memisahkan target dari warga sipil?
- Apakah ada pola dan serangan berulang?

Temuan-temuan dalam laporan ini mengarah pada kesimpulan bahwa setidaknya beberapa serangan terhadap desa-desa tersebut pasti telah dikoordinasikan dan direncanakan dengan baik. Tindakan aparat keamanan dalam menanggapi serangan awal setelah pembunuhan petugas kesehatan pada 13 September 2021 tampak lebih bersifat responsif tanpa direncanakan dengan matang. Sumber media dan saksi mata mengonfirmasi bahwa anggota pasukan keamanan tambahan dikerahkan ke Desa Mangolodgi antara tanggal 22 dan 25 September 2021. Pengerahan personel polisi dan militer tambahan sering kali menandai mulainya operasi pasukan keamanan gabungan. Operasi seperti ini harus direncanakan dengan baik, dikoordinasikan, dan disahkan oleh pejabat tinggi di kepolisian dan militer.

Mengingat serangan terhadap delapan desa di Kiwirok kembali terjadi, melibatkan peralatan militer canggih seperti helikopter dan drone mata-mata, mencakup area seluas 5,18 km<sup>2</sup>, harus diasumsikan bahwa penggerebekan lanjutan setelah 25 September 2021 merupakan bagian dari operasi keamanan gabungan yang direncanakan dan dikoordinasikan dengan cermat.

Serangan terhadap desa-desa di Kiwirok mengikuti pola yang sama yang memperkuat elemen "sistematis" dari definisi tersebut. Anggota pasukan keamanan dilaporkan menyerang dari udara. Tak lama kemudian, pasukan darat bergerak masuk ke desa. Mereka mengamankan daerah tersebut dan menggeledah rumah-rumah. Anggota pasukan keamanan menyita barang-barang pribadi dan memindahkan bahan bangunan dari rumah-rumah untuk membangun pos-pos keamanan. Rumah-rumah penduduk yang tidak terkena bom selama serangan udara kemudian dibakar oleh pasukan darat. Hewan ternak dibunuh.

Statuta Roma tidak memberikan penjelasan tambahan mengenai definisi hukum dari istilah "meluas". Namun, ada konsensus umum di antara para ahli bahwa serangan dianggap meluas jika terjadi dalam skala besar, ditujukan kepada banyak korban yang dituju. Desa-desa yang diserang di Kiwirok terletak di area seluas 5,18 km<sup>2</sup>, memperkuat unsur "serangan yang meluas". Pengungsian internal 2.252 penduduk sipil dari distrik Kiwirok, Kiwirok Timur, Okhika, dan Okbenta sebagai akibat dari operasi di Kiwirok juga memperkuat unsur "serangan yang meluas". Jumlah penduduk asli Ngalum yang mengungsi mencapai 12,5% dari total populasi Ngalum yang diperkirakan mencapai 18.000 orang Ngalum yang tinggal di sisi Indonesia di Pulau Nugini.<sup>34</sup>

## 2. Ditujukan kepada penduduk sipil

Unsur kedua dari kejahatan terhadap kemanusiaan mendefinisikan bahwa serangan tersebut harus ditujukan kepada penduduk sipil. Menurut Pasal 7 (2) Statuta Roma, "Serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil berarti suatu tindakan yang melibatkan beberapa tindakan yang disebutkan dalam ayat 1 terhadap penduduk sipil, sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan Negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut".

Penyerbuan di Kiwirok sebagian besar menasar pemukiman penduduk sipil, menghancurkan rumah-rumah penduduk dan gereja. Para saksi mata memberikan keterangan bahwa pasukan keamanan menembaki tanpa pandang bulu orang-orang yang sedang bekerja di kebun dan menjatuhkan granat mortir ke rumah-rumah penduduk, tanpa memperhitungkan bahwa banyak penduduk sipil akan dirugikan. Banyak rumah penduduk, gereja, dan fasilitas umum dilaporkan rusak akibat granat mortir dan dibakar secara manual, sehingga desa-desa tersebut tidak dapat dihuni lagi. Anggota pasukan keamanan membunuh hewan ternak dan menggunakan dagingnya untuk konsumsi kombatan mereka. Upaya pengungsi untuk kembali, seperti pada kasus pembunuhan

34 Martin Steer (September 2005): Languages of the Upper Sepik and Central New Guinea, hal. 33, tersedia di: [https://static1.squarespace.com/static/576ed271bebabef665249c0t/576ef4d7725e2552c3689535/1466889435280/Languages\\_of\\_the\\_Upper\\_Sepik\\_and\\_Central\\_New\\_Guinea.pdf](https://static1.squarespace.com/static/576ed271bebabef665249c0t/576ef4d7725e2552c3689535/1466889435280/Languages_of_the_Upper_Sepik_and_Central_New_Guinea.pdf)

Alm. Yahya Tepul, ditanggapi dengan serangan oleh penembak jitu. Kehadiran aparat keamanan di daerah tersebut menghalangi para pengungsi untuk kembali ke desa mereka.

Pola serangan di Kiwirok, yang melibatkan penghancuran rumah dan pembunuhan hewan ternak, dapat ditemukan di lima desa. Pola ini mengindikasikan bahwa prosedur ini merupakan bagian dari strategi kontra-pemberontakan (*counterinsurgency*) aparat keamanan terhadap gerilyawan TPNPB. Anggota TPNPB bersembunyi di antara warga sipil dan membutuhkan desa-desa tersebut untuk memasok makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Para anggota TPNPB di Kiwirok adalah penduduk asli setempat. Mereka memiliki hubungan keluarga dengan warga sipil yang tinggal di daerah konflik. Namun, keberadaan para pejuang di antara warga sipil bukanlah alasan yang cukup untuk membenarkan serangan tanpa pandang bulu yang ditujukan kepada pemukiman warga sipil. Khususnya dalam kasus serangan udara terhadap desa-desa kecil, pemisahan yang jelas antara warga sipil dan target tidak lagi dapat dijamin. Oleh karena itu, strategi yang melibatkan penghancuran pemukiman sipil dan ternak secara sengaja harus dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Pola ini dilaporkan terjadi dalam penyerangan di desa Mangoldogi, Sopamikma, Delmatahu, Oknanggal, dan Pelebib.

### 3. "Dengan mengetahui tentang serangan"

Baik pejabat polisi maupun militer tidak membuat pernyataan publik mengenai serangan di Distrik Kiwirok. Pada akhir Oktober 2021, jurnalis menanyai pejabat kepolisian dan militer terkait dugaan serangan udara terhadap kampung-kampung di Distrik Kiwirok. Kepolisian Daerah Papua membantah terlibat dalam pengeboman di kampung-kampung di Kiwirok. Demikian, perwakilan dari Kodam VXII/Cenderawasih juga menolak berkomentar atas tuduhan tersebut.<sup>35</sup>

Serangan yang melibatkan serangan udara terkoordinasi dan operasi pasukan darat membutuhkan perencanaan dan persiapan.

Laporan media tentang pengerahan pasukan keamanan tambahan ke Kiwirok tidak lama setelah insiden pada 13 September 2021,<sup>36</sup> menunjukkan bahwa operasi tersebut telah direncanakan dan dipersiapkan.<sup>37</sup> Para komandan militer mengatur pemindahan personel dan persenjataan tambahan. Kerja sama antara pasukan infanteri dan angkatan udara juga memperkuat dugaan bahwa operasi Kiwirok direncanakan dan dikomando dari atas.

Meskipun tidak ada pernyataan publik dari komandan militer atau kepala polisi yang tersedia, para pejabat mungkin telah mengetahui atau bahkan mungkin telah mengesahkan operasi tersebut. Hanya investigasi menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran HAM berat yang dapat mengungkap siapa yang mengesahkan serangan tersebut, bagaimana struktur komando, dan unit-unit pasukan keamanan mana yang terlibat dalam serangan Kiwirok.

### 4. Tindakan yang berkaitan dengan pembunuhan, pemusnahan, atau deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa

Menurut informasi yang diterima, baik serangan udara maupun serangan darat antara 13 September hingga akhir Oktober 2021 tidak menimbulkan korban jiwa. Pemantau HRM menerima laporan terpisah tentang masyarakat yang disiksa dan dibunuh di daerah Kiwirok. Namun, insiden-insiden ini tidak terjadi antara 21 September dan akhir Oktober 2021. Peristiwa tersebut tidak dilakukan sebagai bagian dari operasi aparat keamanan yang dibahas dalam laporan ini. Namun demikian, harus dipertimbangkan bahwa situasi keamanan di Kiwirok tidak pernah pulih setelah serangan tersebut. Kehadiran aparat keamanan yang sangat ketat di daerah tersebut membuat warga sipil di daerah tersebut berisiko tinggi untuk ditangkap atau dibunuh secara sewenang-wenang. Penembak jitu dilaporkan menembak mati Alm. Yahya Tepmul<sup>38</sup> pada tanggal 27 Oktober 2022, ketika ia sedang mencari babinya

35 Tempo.co (24.10.2023): Aparat Keamanan dan KKB Diminta Menahan Diri dalam Kasus Serangan Bom di Kiwirok, tersedia di <https://fokus.tempo.co/read/1520741/aparat-keamanan-dan-kkb-diminta-menahan-diri-dalam-kasus-serangan-bom-di-kiwirok>

36 Lihat Garis waktu kejadian di Kiwirok di Bagian 6 dari laporan ini

37 lihat tabel *Rekonstruksi waktu serangan bersenjata di Distrik Kiwirok antara 13 September dan 23 Oktober 2021* di Bagian 6 tentang operasi pasukan keamanan di Distrik Kiwirok

38 Pemantau Hak Asasi Manusia (15.11.2022): Penembak jitu menembak mati Yahya Tepmul di Desa Pelebib, Pegunungan Bintang, tersedia di: <https://humanrightsmonitor.org/case/sniper-shoots-dead-mr-yahya-tepmul-di-desa-pelebib-pegunungan-bintang/>



di Desa Pelebib.

Temuan-temuan dalam laporan ini mengungkapkan berbagai bukti yang mendukung terjadinya pemusnahan dan pemindahan paksa terhadap penduduk Ngalum di Distrik Kiwirok. Menurut Pasal 7(2)(b) Statuta Roma, "Pemusnahan" mencakup penghilangan kondisi kehidupan yang disengaja, antara lain perampasan akses terhadap makanan dan obat-obatan, yang diperhitungkan dapat mengakibatkan pemusnahan sebagian dari suatu populasi. Pasal 7(2)(d), menetapkan bahwa "Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa" berarti pemindahan paksa orang-orang yang bersangkutan melalui pengusiran atau tindakan-tindakan pemaksaan lainnya dari wilayah di mana mereka berada secara sah, tanpa alasan-alasan yang diperbolehkan oleh hukum internasional".

Menurut data yang dikumpulkan oleh kelompok solidaritas dan pekerja gereja, serangan terhadap delapan desa di Distrik Kiwirok telah menyebabkan pengungsian internal terhadap 2.252 orang Ngalum. Setidaknya 72 pengungsi dilaporkan meninggal dunia akibat kondisi kehidupan di tempat pengungsian yang jauh dari infrastruktur desa dan tempat tinggal mereka. Para pengungsi masih terisolasi dari segala bentuk bantuan pemerintah, akses kemanusiaan, layanan kesehatan, atau pendidikan hingga saat ini. Kehadiran pasukan keamanan yang ketat di daerah tersebut mempersulit para pengungsi untuk kembali dan membangun kembali desa mereka. Sebagian besar dari pengungsi telah kehilangan rumah, ternak, dan semua harta benda mereka. Hal ini membuat para pengungsi tidak memiliki pilihan selain bersembunyi dan bertahan hidup di tempat penampungan di hutan tanpa akses makanan, kesehatan, dan pendidikan yang memadai.

Kondisi kehidupan di tempat penampungan pengungsi, isolasi dari segala bentuk dukungan pemerintah, dan kurangnya pilihan untuk kembali ke rumah mereka, merupakan situasi yang memenuhi definisi yang dijelaskan dalam Pasal 7(2)(b) Statuta Roma tentang Pemusnahan. Operasi keamanan hanya berdampak serius pada masyarakat asli Papua di Kiwirok. Warga non-Papua

dan pekerja sipil dievakuasi dari Kiwirok dengan menggunakan pesawat terbang antara tanggal 22 dan 25 September. Warga sipil yang dievakuasi hanya sebagian kecil dari populasi yang terkena dampak di Kiwirok. Mengingat pentingnya peternakan dan ketergantungan masyarakat Ngalum pada kebun-kebun mereka sebagai mata pencaharian, jelas bahwa pengusiran paksa dan penghancuran rumah tinggal, termasuk ternak, akan berakibat fatal bagi orang Ngalum, terutama bagi masyarakat lansia dan anak-anak.

Operasi yang menggunakan helikopter dan pasukan darat untuk menyerang desa-desa adat di Kiwirok membuat masyarakat tidak punya pilihan selain melarikan diri ke hutan. Menurut para saksi mata, helikopter-helikopter tersebut menjatuhkan granat mortir ke rumah-rumah penduduk dan menembaki orang-orang yang berada di dalam dan di sekitar pemukiman tanpa pandang bulu. Serangan semacam itu tidak diperbolehkan menurut hukum internasional dan memenuhi definisi menurut Pasal 7(2)(d) tentang "Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa".

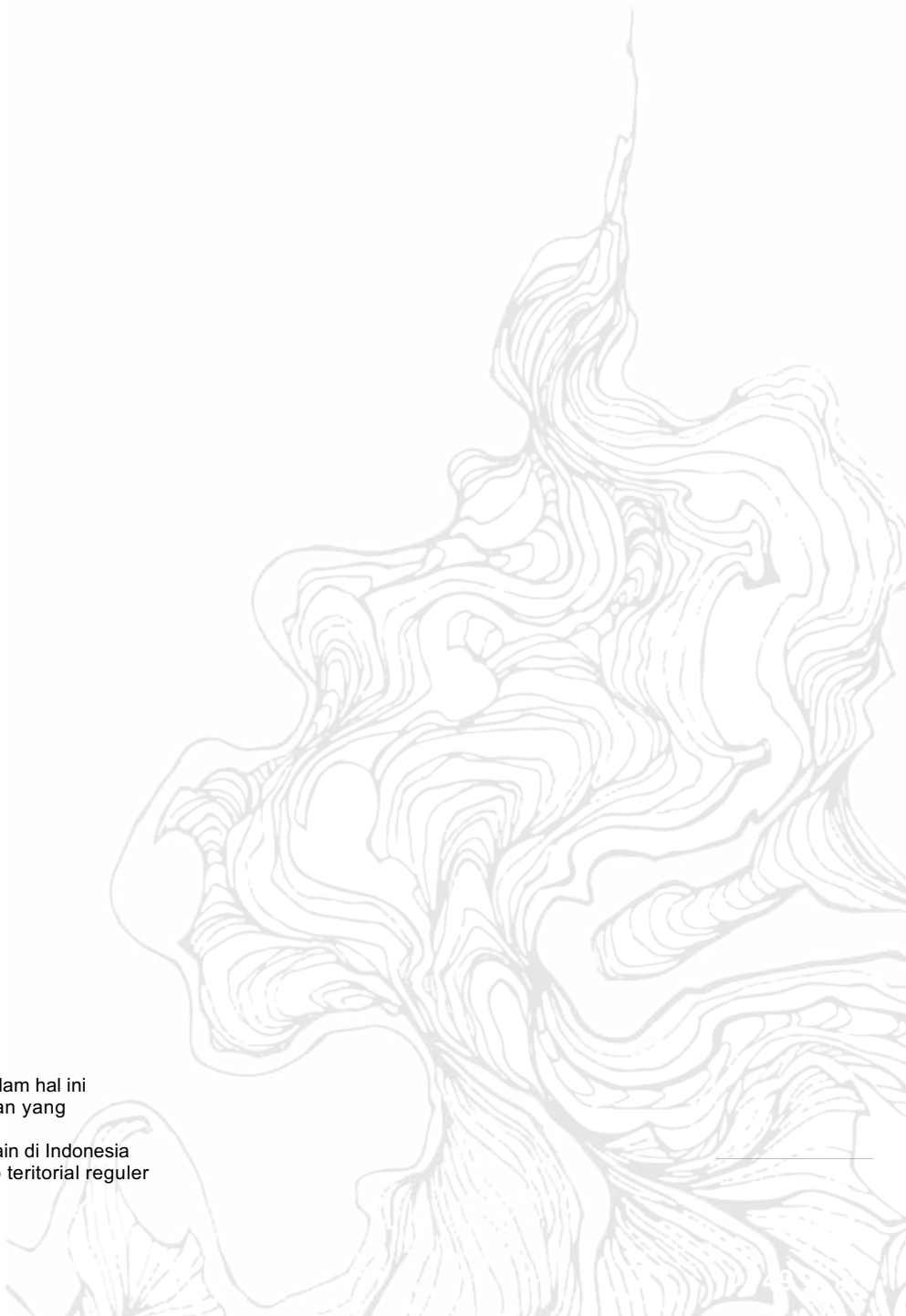
## 10. Rekomendasi

**H**RM merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia, melalui lembaga-lembaga berwenang, untuk

- Segera pastikan akses kemanusiaan untuk organisasi kemanusiaan nasional dan internasional serta lembaga pemerintah ke Distrik Kiwirok. Bantuan kemanusiaan harus diberikan tanpa melibatkan anggota pasukan keamanan untuk memastikan bahwa para pengungsi dapat mengakses bantuan tanpa takut akan pembalasan;
- Menginstruksikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat di Distrik Kiwirok antara 13 September hingga akhir Oktober 2021 sesuai dengan Pasal 9, 18, dan 19 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

- Segera menarik pasukan non-organik<sup>39</sup> dari Distrik Kiwirok, untuk memungkinkan para pengungsi bisa pulang dan membangun kembali desa mereka tanpa takut akan pembalasan dan serangan lebih lanjut;
- Meratifikasi Statuta Roma;
- Bersikap terbuka terhadap keterlibatan yang bermakna dalam dialog perdamaian konstruktif dengan gerakan politik di Tanah Papua, termasuk sayap bersenjata;
- Mengizinkan pengamat internasional dan wartawan asing untuk mengakses dan bekerja di Tanah Papua secara bebas.

39 Personel satuan pengamanan non-organik dalam hal ini mengacu pada personel satuan pengamanan yang untuk sementara waktu dikerahkan ke Papua Barat dari pulau-pulau lain di Indonesia dan bukan merupakan bagian dari komando teritorial reguler







Human Rights Monitor  
(HRM)

Friedrich-Ebert-Str. 55  
42103 Wuppertal, Jerman

web: <https://humanrightsmonitor.org>  
Twitter: @hurimonitor

Memajukan Hak Asasi Manusia melalui Dokumentasi dan Advokasi